

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Lala Agualelia, Fadjar Harimurti, Bambang Widarno

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, *LEVERAGE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Yohanes Calvin Adriano Goa NuwaMinarni A. Dethan Herly M. Oematan

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

Maria Chemy Astary, Yohana Febiani Angi, Maria Indriyani Hewe Tiwu

PENGARUH *LOCUS OF CONTROL*, INDEPENDENSI, DAN KOMPETENSI DALAM MENDETEKSI *FRAUD* (STUDI KASUS PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT)

Yabes Edison Nesimnasi, Linda Lomi Ga, Cicilia A. Tunga

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (*SIMDA*) KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Alwin Fedianto Tameon, Sarinah Joyce Margaret Rafael, Linda Lomi Ga

ANALISIS KINERJA ANGGARAN MENUNGGAKAN METODE *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERODE 2017-2021

Farida Ayu Lestari, Fransina W. Ballo, Novi Theresia Kiak

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2020

Anthon S.Y. Kerihi, Yohanes Demu, Melianus E. Tkela

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN (STUDI KASUS DESA NEKBAUN, KECAMATAN AMARASI BARAT, KABUPATEN KUPANG)

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Diterbitkan oleh :

Universitas Nusa Cendana

Volume 11, No. 1, Maret 2023

Hal. 1 - 78

ISSN : 2338-4468

E-ISSN : 2715-1158

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

PELINDUNG / PENASEHAT

Dekan FEB UNDANA

Dr. Apriana H. J. Fanggidae.,SE.,M.Si

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Program Studi Akuntansi

Linda Lomi Ga, SE., MSA

PEMIMPIN REDAKSI

Sarinah Joyce M. Rafael, SE.,M.Acc.,Ak.,CA

EDITOR

Sarlin Nawa Pau, SE., M.Si., CFrA.

Adhitya Agri Putra, SE., M.Acc., Ak., CA

Angga P. Karpriana, SE., MAcc., Ak.,CA

Meliza Putrianti Zifi, SE., M.Acc.

Maria Elerina Douk Tunti, SE., M.Si.

Moni W. Muskanan, SE., MPA, CFrA.

Yohana Febiani Angi, SE., MAKS

Maria P. L. Muga, SE., M.Si., Ak.

I Komang Arthana, SE., M.Si., CFrA

Filipus Argentano G. Suryaputra,SE.,M.Ak

REVIEWER

Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE,
M.Com. (Hons), CSRS, Ph.D

(Universitas Brawijaya);

Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com
(Hons),Ph.D., Ak. (Universitas Negeri
Solo);

Prof. Intiyas Utami, M.Si., CA., CMA.,
QIA (Universitas Kristern Satya
Wacana)

Yuliansyah, SE., MSA., Ph.D., Akt., CA
(Universitas Lampung);

Dr. Anthon Simon Yohanis Kerih, SE,
MSi. (Universitas Nusa Cendana);

Halim Dedy Perdana, SE., MSM.,
M.Rech., Ak., CFrA (KAP DBSD)

Nuur Widiastono, SE., MSE., Ak., CFE.,
CA., ACPA (IAI Wilayah NTT)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Adisucipto Penfui Kupang-NTT

Telp. (0380) 881183

Fax. (0380) 881183

Email: jak.feb@undana.ac.id

Terbit 2x: MARET dan OKTOBER

Jurnal Akuntansi:
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
diterbitkan oleh:
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

DAFTAR ISI

- 1 – 8*
- **PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**
Lala Agurelia
Fadjar Harimurti
Bambang Widarno
- 9 – 21*
- **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG**
Yohanes Calvin Adriano Goa Nuwa
Minarni A. Dethan
Herly M. Oematan
- 22 – 30*
- **PENGARUH *LOCUS OF CONTROL*, INDEPENDENSI, DAN KOMPETENSI DALAM MENDETEKSI FRAUD (STUDI KASUS PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT)**
Maria Chemy Astary
Yohana Febiani Angi
Maria Indriyani Hewe Tiwu
- 31 - 39*
- **ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**
Yabes Edison Nesimnasi

Linda Lomi Ga
Cicilia A. Tungga
- 40 - 50*
- **ANALISIS KINERJA ANGGARAN MENGGUNAKAN METODE *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERODE 2017-2021**

Alwin Fedianto Tameon
Sarinah Joyce Margaret Rafael

Linda Lomi Ga
51 - 70

■ **ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2020**

Farida Ayu Lestari

Fransina W. Ballo

Novi Theresia Kiak

71 - 78

■ **PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN (STUDI
KASUS DESA NEKBAUN, KECAMATAN AMARASI BARAT, KABUPATEN
KUPANG)**

Anthon S.Y. Kerih

Yohanes Demu

Melianus E. Tkela

PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Lala Agualelia

Universitas Slamet Riyadi Surakarta
plalaguarelia00@gmail.com

Fadjar Harimurti

Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Fadjarharimurti@gmail.com

Bambang Widarno

Universitas Slamet Riyadi Surakarta
bwidarno@yahoo.com

ABSTRAK

Manajemen yang baik dalam mengelola laba akan berdampak baik bagi perusahaan. Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Leverage dan Ukuran Perusahaan dapat membantu agar manajemen laba dijalankan dengan baik sesuai peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis signifikansi pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 26 perusahaan. Sampel pada penelitian ini merupakan keseluruhan dari jumlah populasi. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Jenu yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba sedangkan Beban pajak tangguhan dan Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Manajemen Laba.

ABSTRAK

Good management in managing earnings will have a good impact on the company. Tax Planning, Deferred Tax Expenses, Leverage and Company Size can help so that profit management is carried out properly according to existing regulations. This study aims to analyze the significance of the effect of Tax Planning, Deferred Tax Expenses, Leverage and Company Size on Profit Management of Food and Beverage Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. The population of this study are Food and Beverage Companies listed on the Indonesia Stock Exchange with a total of 26 companies. The sample in this study is the entire population. The type of data used is quantitative data. The data source used is secondary data. The sampling method used is Sampling Jenu, which is a sampling technique when all members of the population are sampled. Data collection techniques using documentation techniques. Data analysis techniques used statistical linear regression test. The results show that Tax Planning and Company Size have no effect on Profit Management while deferred tax expenses and Leverage have an effect on Earning Management.

Keywords: Tax Planning, Deferred Tax Burden, Leverage, Company Size, Profit Management.

PENDAHULUAN

Pandemi virus covid-19 terjadi di Indonesia mulai pertengahan tahun 2019 hingga saat ini masih mengalami dinamika. Dengan adanya pandemi virus covid-19 ini memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia baik dari segi kesehatan dan sosial, terlebih dari segi perekonomian. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan di semua faktor baik pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi hingga pengangguran (cnnindonesia.com, 2021). Dengan kondisi perekonomian yang sangat memburuk banyak sekali perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (Muliando, dkk 2020).

Perusahaan yang masih berdiri sampai saat ini memiliki sistem pengelolaan yang baik, dalam hal pengelolaan SDM dan pengelolaan keuangannya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan adalah laporan akhir yang disediakan perusahaan yaitu Laporan Keuangan. Dengan memahami laporan keuangan perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan perusahaan (R Murhadi 2019:

Dalam laporan keuangan terdapat beberapa laporan, salah satunya adalah laporan laba-rugi yang merupakan laporan penting bagi pihak internal dan eksternal perusahaan karena menyediakan pencatatan laba-rugi perusahaan. Laba perusahaan menjadi tolak ukur terhadap

nilai perusahaan. Apabila laba suatu perusahaan tinggi dalam setiap periodenya maka perusahaan tersebut memiliki kinerja dan nilai yang baik (Telaumbanua, dkk 2021). Dengan mengingat pentingnya peran laba bagi perusahaan maka diperlukan adanya manajemen laba. Manajemen laba merupakan cara yang digunakan manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara memilih kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer dari standar akuntansi dan secara ilmiah dapat memaksimalkan utilitas atau nilai pasar perusahaan (Scott, 2015).

Pizza Hut atau PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) mengalami penurunan laba yang signifikan ditahun 2021 dikarenakan adanya pandemi virus covid-19. Pizza Hut mencatat bahwa terjadi penurunan laba kuartal I tahun 2021 yaitu sebesar 19,34% yang semula Rp. 6,04 miliar menjadi Rp. 4,87 miliar. Menurunnya laba bersih dipicu karena berkurangnya pendapatan perusahaan yang turun sebesar 25,29% menjadi Rp. 713,93 miliar yang pada tahun lalu sebesar Rp. 955,64 miliar. “perusahaan telah mempertimbangkan dampak dari gangguan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pada tanggal 31 Maret 2021 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode dan tahun yang berakhir pada saat tersebut. Perusahaan terus memantau situasi tersebut,” tulis manajemen dalam laporan keuangan, dikutip CNBC Indonesia, Kamis (1/7). PT Sarimelati Kencana mencatatkan rugi bersih tahun lalu sebesar Rp. 93,51 miliar, atau berbalik dari tahun 2019 yang mencetak laba bersih sebesar Rp. 200,02 miliar. Melihat fenomena diatas dimana Pizza Hut mengalami kerugian hal ini dapat mengancam posisi perusahaan karena laba yang dihasilkan perusahaan cenderung lebih rendah dari tahun ke tahun, manajer belum mengambil langkah yang bijak dalam mengelolah laba dalam perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kajian tentang bagaimana mengelolah laba perusahaan yang tepat.

Dengan mengacu pada penelitian terdahulu bahwa masih terdapat hasil yang bertentangan pada variabel perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dan dengan melihat pada fenomena yang terjadi dan juga mengingat bahwa makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tingginya permintaan di sektor makanan dan minuman maka seharusnya berdampak pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang optimal, selain itu juga sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor usaha yang terus mengalami pertumbuhan (Aziz, 2014). Maka dilakukakanlah penelitian ini, yaitu Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengkaji ulang pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap

manajemen laba. Didasarkan pada pentingnya perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, leverage dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba perusahaan agar perusahaan penyalahgunaan laba perusahaan dan dapat mengatur laba perusahaan dengan baik untuk kepentingan pihak internal dan eksternal.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan agency terjadi saat satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak. Teori keagenan adalah penyerahan penuh keputusan dari prinsipal kepada agen untuk mengatur atau menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk mengutamakan kepentingan bersama demi meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam teori keagenan terdapat asumsi-asumsi yang menyatakan bahwa pihak prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang cenderung mementingkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, prinsipal cenderung mementingkan dirinya sendiri dengan cara mengadakan kontrak-kontrak agar menghasilkan deviden yang meningkat dan akhirnya harga saham perusahaan pun ikut meningkat, sedangkan agen memiliki motivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui kompensasi yang akan diberikan sebagai penghargaan atas pencapaian yang nantinya akan dicapai. Dengan adanya asumsi kepentingan tersebut maka memungkinkan anantara agen dan prinsipal terjadi kesenjangan informasi atau biasa disebut asimetri informasi dimana agen menyimpan banyak informasi termasuk informasi penting yaitu laporan keuangan, sedangkan prinsipal terbatas dalam mengetahui laporan-laporan perusahaan. Dari terjadinya kesenjangan informasi dan asimetri informasi ini memicu agen untuk melakukan manajemen laba (Djamaludin, 2008:56).

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman tahun 1986 dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain didalam perusahaan. Dalam teori ini menyatakan bahwa kondisi ekonomi /

faktor ekonomi dapat berpengaruh terhadap perilaku pembuat laporan keuangan.

Perencanaan Pajak

Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Chairil Anwar Pohan, 2018: 317). Tujuan dalam perencanaan pajak adalah meminimalkan jumlah pembayaran pajak perusahaan kepada pemerintah.

Beban Pajak Tangguhan

Beban Pajak Tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Beban pajak tangguhan dikelompokkan berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen. pajak secara final, dan adanya non deductible expense (biaya yang tidak boleh dikurangkan).

Leverage

Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya Menurut (Kasmir 2018:151).

Ukuran Perusahaan

Menurut Machfoedz (1994), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan. Ukuran perusahaan berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total asset perusahaan. Bentuk logaritma digunakan karena pada umumnya nilai aset perusahaan sangat besar, sehingga menyeragamkan nilai dengan variabel lainnya dengan melogaritma natural-kan total asset (Sugiarto, 2011:98).

Manajemen Laba

Manajemen Laba adalah semua tindakan yang digunakan oleh para manajer untuk memengaruhi laba sesuai dengan tujuannya (R.A Supriyono, 2018: 123). Manajemen laba yang merupakan cara yang digunakan manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara pemilihan kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan secara ilmiah dapat memaksimalkan utilitas

mereka dan atau nilai pasar perusahaan (Scott, 2015).

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian yang sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya (Arikunto 2019 : 27). Data berupa Laporan Keuangan Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja digunakan untuk penelitian. Data sekunder yang akan diolah dalam penelitian ini bersumber dari data laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit tahun 2018-2021 yang akan diperoleh dari situs <https://www.idx.co.id>. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Ada 26 perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini merupakan keseluruhan Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampling Jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Data berupa laporan keuangan perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2021. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji normalitas dan uji hipotesis yaitu uji regresi linear berganda, uji t, uji ketetapan model (Uji F), uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil analisis statistik deskriptif

Variabel	N	Minimu m	Maxi mum	Mean
Perencanaa n pajak	104	-31,2520	51,72 30	4,109918
Beban pajak tanggihan	104	0,000	0,134	0,01618
Leverage	104	0,001	2,900	0,46678
Ukuran perusahaan	104	14,38	30,62	24,6179
Manajemen laba	104	0,6200	735,5 900	45,095596

Hasil Analisis Statistik Deskriptif menunjukkan variabel Perencanaan pajak pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 yang dihitung dengan indikator laba bersih perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak memiliki nilai minimum sebesar -31,2520 atau -3,125%, nilai maksimum sebesar 51,7230 atau 5,172%. Nilai rata-rata Perencanaan Pajak sebesar 4,109918 atau 4,1%. Variabel Beban pajak tanggihan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 yang dihitung dengan indikator beban pajak tanggihan dibagi dengan total aset perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,00 atau 0%, nilai maksimum sebesar 0,134 atau 13,4%. Nilai rata-rata beban pajak tanggihan sebesar 0,01618 atau 16,1%. Variabel Leverage pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 yang dihitung dengan indikator yaitu total hutang dibagi dengan total aset, memiliki nilai minimum sebesar 0,001 atau 0,1%, nilai maksimum sebesar 2,900 atau 2,9%. Nilai rata-rata Leverage sebesar 0,46678 atau 46,7%. Variabel Ukuran perusahaan pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 yang dihitung dengan indikator yaitu log natural total aset perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 14,38 atau 14,38%, nilai maksimum sebesar 30,62 atau 30,62%. Nilai rata-rata Ukuran Perusahaan sebesar 24,6179 atau 24,6%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>tolerance</i> <i>value</i>	Kriteri a	VIF	Kriteri a
Perencanaan pajak (X1)	0,958	0,10	1,044	10
Beban pajak tanggihan (X2)	0,787	0,10	1,271	10
Leverage (X3)	0,791	0,10	1,264	10
Ukuran Perusahaan (X4)	0,926	0,10	1,080	10

Hasil uji Multikolinearitas dapat diketahui bahwa semua variabel independen yaitu perencanaan pajak (X1), beban pajak tanggihan (X2), leverage (X3) dan ukuran perusahaan (X4) menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas dikarenakan oleh nilai tolerance value > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil uji autokorelasi

<i>Runs Test</i>	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.830

Hasil uji autokorelasi yaitu bila p-value (signifikansi) > 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil menunjukkan keadaan yang signifikan 0,830 > 0,05 hal ini berarti tidak terjadi autokorelasi (bebas autokorelasi).

Uji Heterokedasitas

Tabel 4. Hasil uji heterokedasitas

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	5.138	48.241		0.107	0.915
Perencanaan Pajak (X1)	-0.117	1.004	-0.012	-0.117	0.907
Beban Pajak Tanggihan (X2)	569.508	390.016	0.160	1.460	0.147
Leverage (X3)	-51.759	27.723	-0.204	-1.867	0.065
Ukuran Perusahaan (X4)	2.594	1.757	0.149	1.477	0.143

Hasil uji Hetrokedasitas menunjukkan p-value untuk variabel perencanaan pajak (X1) sebesar 0,907, beban pajak tanggihan (X2) sebesar 0,147, leverage (X3) sebesar 0,065 dan ukuran perusahaan (X4) sebesar 0,143, semua p-value > 0,05 ini berarti model regresi yang digunakan tidak terjadi heterokedasitas.

Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil uji normalitas

Unstandardized Residual		
N		87
Normal Parameters ^a	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,24614977
Most Extreme Differences	Absolute	0,051
	Potitive Negative	0,045 -0,051
Kolmogorov- Smirnov Z		0,051
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Hasil uji normalitas diperoleh nilai p-value $0,200 > 0,05$. Hal ini menunjukkan keadaan yang tidak signifikan, berarti H_0 diterima artinya bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil uji regresi linear berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	-0,030	-0,028	0,978
Perencanaan Pajak	0,155	1,595	0,115
Beban Pajak Tangguhan	4,917	2,843	0,006
Leverage	-1,511	-2,670	0,009
Ukuran Perusahaan	0,176	0,929	0,356

Adjusted R Square = 0,123

F-hitung = 3,979

Sig. F = 0,005

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,030 + 0,155 X_1 + 4,917 X_2 - 1,511 X_3 + 0,176 X_4 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- a : -0,030 artinya jika perencanaan pajak (X1), beban pajak tangguhan (X2), leverage (X3) dan ukuran perusahaan (X4) sama dengan nol, maka manajemen laba (Y) adalah negatif sebesar 0,030.
- b1 : 0,155 artinya pengaruh perencanaan pajak (X1) terhadap manajemen laba (Y) positif, artinya apabila perencanaan pajak meningkat maka dapat meningkatkan manajemen laba (Y), dengan asumsi variabel beban pajak tangguhan (X2), leverage (X3) dan ukuran perusahaan (X4) dianggap tetap.
- b2 : 4,917 artinya pengaruh beban pajak tangguhan (X2) terhadap manajemen laba (Y) positif, artinya apabila beban pajak tangguhan meningkat maka dapat meningkatkan manajemen laba (Y), dengan asumsi variabel perencanaan pajak (X1), leverage (X2) dan ukuran perusahaan (X3) dianggap tetap.
- b3 : -1,511 artinya pengaruh variabel leverage (X1) terhadap manajemen laba (Y) negatif, artinya apabila leverage meningkat, maka dapat menurunkan manajemen laba (Y), dengan asumsi variabel perencanaan pajak (X1), beban pajak tangguhan (X2) dan ukuran perusahaan (X4) dianggap tetap.
- b4 : 0,176 artinya pengaruh variabel ukuran perusahaan (X4) terhadap manajemen laba (Y) positif, artinya apabila ukuran perusahaan meningkat maka dapat meningkatkan manajemen laba (Y), dengan asumsi variabel perencanaan pajak (X1), beban pajak tangguhan (X2) dan leverage (X4) dianggap tetap.

Berdasarkan analisis tersebut, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap manajemen laba adalah variabel leverage (X3), karena nilai koefisien regresinya paling besar yaitu -1.511 diantara koefisien regresi variabel bebas yang lain (perencanaan pajak (X1) sebesar 0,155 dan ukuran perusahaan (X4) sebesar 0,176)

Uji t

Tabel 7. Hasil uji t

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
(Constant)	-0.030	1.059		-0.028	0.978
Perencanaan Pajak (X1)	0.155	0.097	0.181	1.595	0.115
Beban Pajak Tangguhan (X2)	4.917	1.729	0.315	2.843	0.006
Leverage (X3)	-1.511	0.566	-0.279	-2.670	0.009
Ukuran Perusahaan (X4)	0.176	0.190	0.101	0.929	0.356

Hasil uji t menunjukkan bahwa Variabel Perencanaan Pajak memiliki p-value $0,115 > 0,05$, maka H_0 diterima berarti perencanaan pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Y) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Variabel Beban Pajak Tangguhan memiliki dengan p-value sebesar $0,006 < 0,05$, maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif signifikan beban pajak tangguhan (X2) terhadap manajemen laba (Y) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Variabel *Leverage* memiliki p-value sebesar $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti leverage (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba (Y) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki p-value sebesar $0,356 > 0,05$ maka H_0 diterima berarti ukuran perusahaan (X4) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Y) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Uji Ketetapan Model (Uji F)

Tabel 8. Hasil uji ketetapan model (uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	13.973	4	3.493	3.979	0.005 ^b
Residual	71.117	81	0.878		
Total	85.091	85			

Hasil uji ketetapan model (uji F) diperoleh F hitung sebesar 3,979 dengan p-value sebesar $0,005 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel independen yaitu perencanaan pajak (X1), beban pajak tangguhan (X2), leverage (X3) dan ukuran perusahaan (X4) secara simultan terhadap manajemen laba (Y) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

Uji koefisien determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil uji koefisien determinasi
Model Summary

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.405 ^a	0.164	0.93701

Hasil Uji Koefisien Determinasi diperoleh koefisien determinasi (Adjusted R²) = 0,123 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yaitu perencanaan pajak (X1), beban pajak tangguhan (X2), leverage (X3) dan ukuran perusahaan (X4) terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba (Y) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 sebesar 12,3% sedangkan sisanya ($100\% - 12,3\%$) = 87,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 1,595 dengan p-value $0,115 > 0,05$, maka H_0 diterima berarti perencanaan pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Y) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Dilihat lagi dalam tujuan perusahaan bahwa tujuan perusahaan melakukan manajemen laba salah satunya adalah untuk menghindari penurunan laba, agar posisi manajer dapat dianggap aman, sehingga hal ini berbeda dengan tujuan perencanaan pajak adalah untuk memangkas besarnya laba kena pajak perusahaan.

Beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 2,834 dengan p-value sebesar $0,006 < 0,05$, maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh positif signifikan beban pajak tangguhan (X2) terhadap manajemen laba (Y) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2018-2021. Jika perusahaan yang menunda pembayaran pajak yang menjadi tanggungannya pada periode tertentu, sehingga laba yang dilaporkan pada periode bersangkutan akan lebih besar, maka manajer akan melakukan pengelolaan dalam melakukan penundaan pembayaran pajak inilah yang termasuk tindakan manajemen laba.

Leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar -2,670 dengan p-value sebesar $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti leverage (X3) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Y) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Pada dasarnya, Leverage timbul karena perusahaan menggunakan sumber dana berupa utang yang menyebabkan munculnya biaya tetap yang harus ditanggung, oleh karena itu pada saat tingkat Leverage tinggi akan mendorong manajer untuk menjaga labanya, hal inilah yang disebut manajemen laba. Dan jika total utang lebih kecil dari ekuitas yang dimiliki perusahaan sehingga biaya tetap yang ditanggung perusahaan masih bisa dikendalikan, maka kualitas laba perusahaan dalam keadaan baik.

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

Hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 0,929 dengan p-value sebesar $0,356 > 0,05$ maka H_0 diterima berarti ukuran perusahaan (X4) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Y) pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Jika suatu perusahaan besar maka akan semakin kecil indikasi terjadinya manajemen laba, karena perusahaan besar biasanya lebih menjadi sorotan masyarakat sehingga harus lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Supatminingsih dan Monot Wicaksono (2020) dan I Komang Eva Trisma Yasa, Ni Made Sunarsih, I Gusti Ayu Asri Pramesti (2020) bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, apabila beban pajak tangguhan meningkat maka manajemen laba akan meningkat. Leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, apabila leverage meningkat maka manajemen laba akan meningkat. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya baik dalam pengelolaan laba ataupun kinerja keuangan yang lain agar kedepan dapat menjadi perusahaan yang

memiliki hasil kerja yang baik dalam segi apapun. Bagi peneliti selanjutnya dapat lebih memvariasikan variabel-variabel yang diteliti agar pembaca dapat semakin memiliki banyak wawasan tentang hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap manajemen laba serta dapat memperluas objek-objek penelitian di sektor-sektor yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Dea Savitri Ayu Lestari, I. K. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 -2017). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 129 -150.
- Harnovinsah, B. S. (2015). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas, dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2010-2014). 15-40.
- Kanji, L. (2019). Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Mnaufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 20 - 27.
- Lestari, F. A. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 77 - 88.
- Lutfi M Baradja, Y. Z. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 191 - 206.
- Purwaningsih, F. A. (2013). Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 1-15.
- Putra, Y. M. (2019). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Food & Beverage yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1 - 21.
- Sudjiman, A. T. (2021). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Laba Perusahaan pada PT SARI ENESIS INDAH Tahun 2017 - 2021. *Jurnal Audit & Perpajakan*, 60 - 68.
- Wulansari, T. A. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara* , 96 - 107.
- Hasibuan, D. &. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Resiko Keuangan dan Pertumbuhan Perusahaan. *JURNAL MANAJEMEN DAN KEUANGAN*, VOL.8, NO.1, MEI 2019, 21-33.
- Kumalasari. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA. *E-JURNAL EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA*, 809-816.
- Oktaviani, A. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan,. *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, Vol. 14, No. 1, Juli 2021, 92-100.
- Rere, H. S. (2020). MANAJEMEN LABA: PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 4 No. 3, 1853 - 1869.
- Yuyetta, A. &. (2020). PENGARUH LEVERAGE, SALES GROWTH, UKURAN. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING* Volume 9, Nomor 3, 1-14.
- <https://www.idnfinancials.com/id/company/industry/food-and-beverages-42> (Diakses 16 November 2022)
- <https://gopublic.idx.co.id/> (Diakses 16 November 2022)
- <https://www.idx.co.id/id> (Diakses 16 November 2022)
- https://www.google.com/search?q=definisi+Tingkat+Retensi+Pajak+perusahaan&biw=1024&bih=457&ei=-e1-Y77GK-6fseMPt-Gi-AI&ved=0ahUKEwj-pt7V-MX7AhXuT2wGHBewCC84ChDh1QMI Dg&uact=5&oq=definisi+Tingkat+Retensi+Pajak+perusahaan&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoA (Diakses 24 November 2022)
- <https://www.google.com/search?q=kaitan+penurunan+laba+dengan+manajemen+laba+dan+perencanaan+pajak&oq=kaitan+penurunan+laba+dengan+manajemen+laba+dan+perencanaan+pajak&aqs=chrome..69i57.57685j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Diakses 27 November 2022)
- https://www.google.com/search?q=rumus+manajemen+laba+dengan+market+value+of+equity&ei=TXCDY4TkGIS54t4Pr_SSsA4&ved=0ahUKEwjEvuTCxc77AhWENgFHS-6BOYQ4dUDCA4&uact=5&oq=rumus+manajemen+laba+dengan+market+value+of+equity&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoAE6 (Diakses 27 November 2022)
- https://www.google.com/search?q=uji+koefisien+determinasi+regresi+sederhana+menurut+sugiyono+2018&ei=V2-DY732HZrV4-EPjsCFgAM&ved=0ahUKEwj9_cLNxM77AhWa6jgGHQ5gATAQ4dUDCA4&uact=5&oq=uji+koefisien+determinasi+regresi+sederhana+menurut+sugiyono+2018&gs_lcp=Cg (Diakses 27 November 2022)

- <https://www.google.com/search?q=uji+statistik+deskriptif+menurut+para+ahli+terbaru&oq=uji+statistik+deskriptif+menurut+para+ahli+terbaru&aqs=chrome..69i57j33i10i22i29i30.20530j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> (Diakses 27 November 2022)
- <https://serupa.id/metode-penelitian-kuantitatif-pengertian-karakteristik-jenis/> (Diakses 27 November 2022)
- [https://www.google.com/search?q=pola+manajemen+laba+menurut+scott+\(2015\)&oq=pola+manajemen+laba+menurut+&aqs=chrome.0.0i512i2j69i57.11050j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=pola+manajemen+laba+menurut+scott+(2015)&oq=pola+manajemen+laba+menurut+&aqs=chrome.0.0i512i2j69i57.11050j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) (Diakses 27 November 2022)
- <https://library.uns.ac.id/manajemen-laba-dan-manfaat-kualitas-laba-dalam-keputusan-investasi/> (Diakses 8 Desember 2022)
- https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/3218126438990fa0771ddb555f70be42.pdf (Diakses 8 Desember 2022)
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8779/6/BAB%20III.pdf> (Diakses 8 Desember 2022)
- <https://www.statistikian.com/2017/01/uji-autokorelasi-durbin-watson-spss.html> (Diakses 8 Desember 2022)
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200327/12/1218688/riset-industri-fb-paling-terdampak-pandemi-corona> (Diakses 8 Desember 2022)
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210811220610-532-679242/babak-belur-ekonomi-dihajar-15-tahun-pandemi> (Diakses 8 Desember 2022)
- <https://www.google.com/search?q=rumus+roa+menurut+kasmir+2016&tbm=isch&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjU2oHOw8L8AhVlyKACHWg2AR0QrNwCKAB6BAgBEG8&biw=1007&bih=440> (Diakses 12 Januari 2023)
- <https://deepublishstore.com/klasifikasi-ukuran-perusahaan/> (Diakses 12 Januari 2023)
- <https://www.idnfinancials.com/> (Diakses 4 Maret 2023)

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

Yohanes Calvin Adriano Goa Nuwa

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
calvinnuwa@gmail.com

Minarni A. Dethan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
minarni.dethan@staf.undana.ac.id

Herly M. Oematan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
herly.oematan@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Kupang, sebagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional puskesmas dan mengetahui biaya lingkungan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan lingkungan dan anggaran biaya lingkungan. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan lingkungan yang dilakukan oleh puskesmas seperti, pengelolaan air limbah menggunakan Instalasi Pengelola Air Limbah (IPAL) atau saluran resapan yang dialirkan berupa septic tank, limbah medis menggunakan insinerator dan limbah non medis di tempat penyimpanan di tempat pembuangan sementara (TPS) dan kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sedangkan Dinas Kesehatan Kota Kupang hanya berperan sebagai manajemen yang mengontrol atau mengawasi, memantau atau mengawasi setiap kegiatan penanganan sampah yang dilakukan oleh puskesmas. Anggaran biaya pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang tahun 2017-2020 yaitu 1) biaya pencegahan seperti, belanja jasa pihak ketiga untuk biaya pembakaran sampah medis dan pelatihan pengelolaan sampah medis, 2) biaya kegagalan internal seperti, pengelolaan limbah transportasi medis dan perjalanan dinas transportasi sampah medis, dan 3) biaya deteksi lingkungan seperti pengawasan layanan perjalanan medis pengawasan limbah medis.

Kata kunci: Akuntansi lingkungan, kegiatan lingkungan dan lingkungan biaya.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of environmental accounting at the City of Kupang Health Office, as an effort to reduce the environmental impact caused by the operational activities of the health center and to know the environmental costs of the City of Kupang Health Office. This research is a descriptive qualitative research. The variables used in this study are environmental activities and environmental cost budgets. The results of this study are environmental activities carried out by health centers such as, waste water management using Waste Water Management Installation (IPAL) or infiltration channels that are channeled in the form of septic tank, medical waste using incinerator and non-medical waste in the storage area in a temporary landfill (TPS) and then transported to a landfill (TPA). While the Kupang City Health Office only acts as the management that controls or supervises, monitors or supervises every waste handling activity carried out by the puskesmas. The budget for waste management costs incurred by the Kupang City Health Office from 2017-2020, namely 1) prevention costs such as, third-party service expenditure for medical waste combustion costs and medical waste management training, 2) internal failure costs such as, transport waste management medical and medical junk transport official travel, and 3) environmental detection costs such as medical travel service supervision supervision of medical waste.

Keywords: Environmental accounting, environmental activities and environmental costs.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan manusia di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, sejalan dengan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat itu sendiri. Terlihat bahwa pertumbuhan manusia sejak tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk sebesar 258.705.000 jiwa, tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 261.890.900 jiwa, dan tahun 2018 jumlah penduduk sebesar 265.015.300 jiwa (<https://www.bps.go.id>). Pada Kota Kupang sendiri pertumbuhan penduduk juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk sebesar 402.286 jiwa, tahun 2017 jumlah penduduk sebesar 412.708 jiwa dan tahun 2018 sebesar 423.080 jiwa (*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang*). Hal ini pastinya akan memperoleh permasalahan yang timbul, ketika pertumbuhan manusia meningkat otomatis jumlah pasien yang ada di rumah sakit maupun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) juga mengalami peningkatan. Terlihat bahwa jumlah pasien yang ada di Kota Kupang pada tahun 2016 sebesar 164.299 jiwa, tahun 2017 sebesar 225.802 jiwa dan tahun 2018 sebesar 225.836 jiwa (*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kupang*), dengan semakin banyaknya pasien tersebut, pastinya limbah medis yang diperoleh juga semakin bertambah.

Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota, yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja (<https://kemkes.go.id>). Puskesmas juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga dapat memberikan dampak negatif, seperti limbah yang berpotensi mencemari lingkungan dan menularkan penyakit. Limbah puskesmas merupakan semua limbah yang dihasilkan, oleh kegiatan puskesmas itu sendiri, baik dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas yang dapat mengandung bahan kimia beracun (<https://kemkes.go.id>). Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh puskesmas terhadap masyarakat cukup besar dan susah dikendalikan seperti jarum suntik, pecahan gelas medis, pisau bedah, isolasi medis, cairan tubuh, obat-obatan kedaluarsa, air infus/cairan medis, dan lain sebagainya.

Saat ini puskesmas mulai sadar, akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional yang telah dilakukan, hal ini didukung dengan regulasi dari pemerintah seperti Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan perlu dilakukan sebagai upaya tanggung jawab puskesmas terhadap lingkungan sekitar. Dalam akuntansi lingkungan sangat cenderung menyoroti masalah-masalah yang timbul dari kegiatan sosial atau dampak dari kegiatan secara teknis seperti, pada saat penggunaan alat atau bahan baku, yang kemudian akan menghasilkan limbah produksi yang berbahaya. Hal ini sangat penting dikarenakan di Indonesia saat ini terlalu banyak organisasi pemerintahan atau swasta yang dalam kegiatan pelaksanaan operasionalnya menimbulkan kerusakan ekosistem karena adanya, limbah produksi yang dihasilkan oleh organisasi pemerintahan ataupun swasta itu sendiri.

Data tentang limbah medis yang ditimbulkan oleh Rumah Sakit (RS) di Indonesia secara umum mencapai 242 ton per hari dari 2.813 RS di Indonesia. Sehingga dari jumlah tersebut rata-rata tumpukan limbah mencapai 87 kilogram per hari, artinya limbah yang belum dikelola masih cukup besar, banyaknya limbah yang tidak terkelola salah satunya disebabkan oleh jasa pengelolaan yang tidak banyak, dan juga terdapat jasa pemusnahan limbah yang ditutup akibat tidak bekerja sesuai dengan prosedur. (<https://www.persi.or.id/78-berita/berita-persi/531-klhk-limbah-medis-seluruh-indonesia-capai-242-ton-per-hari>). Data limbah medis di NTT/Kota Kupang secara khusus terus meningkat setiap tahunnya. Di kota Kupang, dari seluruh rumah sakit/puskesmas terdapat 148 ton limbah medis hingga Januari 2019 (<https://www.mongabay.co.id/2019/06/26/sampah-medisdi-ntt-kianmenggung-bagaimana-mengatasinya/>). Oleh karena itu diperlukanlah penanganan khusus untuk dapat mengukur biaya lingkungan, dari aktivitas pengelolaan lingkungan tersebut. Menurut Ikhsan Arfan (2009: 82), biaya lingkungan merupakan dampak, baik moneter maupun non-moneter yang terjadi oleh hasil aktifitas operasional yang berpengaruh pada kualitas lingkungan. Perhitungan biaya untuk penanganan limbah tersebut diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang sistematis secara benar. Perlakuan pada masalah penanganan limbah hasil

operasional ini sangat penting dalam pengendalian pertanggungjawaban terhadap lingkungan.

Keuntungan yang diperoleh dari penerapan akuntansi lingkungan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar biaya lingkungan yang dikeluarkan untuk mengolah limbah tersebut dengan menggunakan sistem akuntansi sehingga bisa meminimalkan biaya yang dikeluarkan, bisa mengontrol tanggungjawab organisasi dalam menjaga lingkungan sekitarnya (Ikhsan Arfan, 2009:21). Dinas Kesehatan Kota Kupang memiliki struktur organisasi yang sudah ditentukan berdasarkan tugas pokok Dinas Kesehatan Kota Kupang sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor : 6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: Merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah dan umum, melakukan pengawasan/pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan dasar, kesehatan keluarga, pengendalian dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, dan promosi kesehatan.

Dinas Kesehatan Kota Kupang adalah salah satu instansi pemerintahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan membawai 11 puskesmas yang ada di Kota Kupang. Untuk menunjang salah satu kegiatan pelaksanaan lingkungan kesehatan yang baik, maka upaya-upaya kesehatan lingkungan perlu dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan atas limbah yang dihasilkan. Oleh sebab itu perlu adanya perencanaan anggaran yang baik, untuk membiayai pengelolaan limbah tersebut.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian ini dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Atas Pengelolaan Limbah Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang”.

KAJIAN TEORITIS

Lingkungan

Lingkungan Menurut *International Standard Organization* (ISO) 14001 adalah keadaan sekeliling dimana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan interaksinya. Lingkungan di Indonesia sering disebut lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan dan makhluk hidup,

termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.. Dampak lingkungan adalah perubahan apapun yang terjadi pada lingkungan, baik yang merugikan, maupun yang bermanfaat, yang keseluruhnya atau sebagian disebabkan oleh lingkungan dan organisasi.

Akuntansi Lingkungan

Istilah akuntansi lingkungan mempunyai banyak arti dan kegunaan. Akuntansi lingkungan dapat mendukung akuntansi pendapatan, akuntansi keuangan maupun bisnis internal akuntansi manajerial. Fokus utamanya didasarkan pada penerapan akuntansi lingkungan sebagai suatu alat komunikasi manajerial untuk pengambilan keputusan bisnis internal (Ikhsan Arfan, 2009:14).

Akuntansi lingkungan merupakan istilah berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari kesempatan dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut (Ikhsan Arfan, 2009:26).

Akuntansi lingkungan dapat selanjutnya digambarkan dalam dua area utama, yaitu (Ikhsan Arfan, 2009:84):

1. Akuntansi lingkungan keuangan

Menekankan pada analisa dan komponen pelaporan dari biaya internal dan kewajiban terkait masalah lingkungan. Ini secara khas merupakan domain dari seorang akuntan yang mempersiapkan pelaporan keuangan untuk kredit dan investor.

2. Akuntansi manajerial

Akuntansi manajerial memiliki satu fokus berbeda. Dukungan manajemen internal dan proses pembuatan keputusan melalui berbagai ilmu pengetahuan tentang teknik alokasi biaya, pengukuran kinerja dan analisis bisnis.

Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan

Tujuan akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan, yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Keberhasilan tidak

hanya tergantung pada ketepatan dalam menggolongkan semua biaya-biaya yang dibuat perusahaan. Akan tetapi kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan.

Menurut Ikhsan Arfan (2009:21) tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Akuntansi lingkungan merupakan alat manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan, biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan.
2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, sebagai alat komunikasi publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

Pentingnya Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan menjadi hal yang penting untuk dapat dipertimbangkan dengan sebaik mungkin karena akuntansi lingkungan merupakan bagian akuntansi atau sub bagian akuntansi. Alasan yang mendasari adalah mengarah pada, keterlibatannya dalam konsep ekonomi dan informasi lingkungan. Akuntansi lingkungan juga merupakan suatu bidang yang terus berkembang dalam mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan mengkomunikasikan biaya-biaya aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya. Biaya ini meliputi biaya- biaya pembersihan atau perbaikan tempat-tempat yang terkontaminasi, biaya pelestarian lingkungan, biaya hukuman dan pajak, biaya pencegahan polusi teknologid dan biaya manajemen pemborosan (Ikhsan Arfan, 2009: 26).

Fungsi dan Peranan Akuntansi Lingkungan

Menurut (Ikhsan Arfan, 2009:32). fungsi dan peran akuntansi lingkungan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Internal

Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan

sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa lainnya. Adapun yang menjadi aktor dan faktor dominan pada fungsi internal ini adalah pimpinan perusahaan. Sebab pimpinan perusahaan merupakan orang yang bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan maupun penentuan setiap kebijakan internal perusahaan. Sebagaimana halnya dengan sistem informasi lingkungan perusahaan, fungsi internal memungkinkan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan- kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan pengambilan keputusan.

2. Fungsi Eksternal

Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. Fungsi ini merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konservasi lingkungan dalam bentuk data akuntansi. Informasi yang diungkapkan merupakan hasil yang diukur secara kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan. Termasuk didalamnya adalah informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Fungsi eksternal memberikan kewenangan bagi perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan *stakeholder*, seperti pelanggan, rekan bisnis, investor, penduduk lokal maupun bagian administrasi.

Biaya Lingkungan

Lingkungan adalah dampak, baik moneter atau non-moneter yang terjadi oleh hasil aktifitas perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan (Ikhsan Arfan, 2009:82). Definisi biaya lingkungan mencakup seluruh biaya-biaya paling nyata (seperti limbah buangan), untuk mengukur ketidak pastian. Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produksi, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Menurut Hansen dan Mowen (2009: 403) biaya lingkungan meliputi:

1. Biaya pencegahan (*Environmental Prevention Costs*)

Biaya pencegahan adalah biaya- biaya untuk aktivitas yang dilakukan, untuk mencegah diproduksinya limbah dan/atau sampah yang dapat merusak lingkungan.

Contoh aktivitas-aktivitas pencegahan adalah evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit resiko lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, serta pemerolehan sertifikat ISO 14001.

2. Biaya deteksi lingkungan (*Environmental Detection Costs*)

Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh aktivitas deteksi lingkungan adalah audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses (agar ramah lingkungan), pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran.

3. Biaya kegagalan internal (*Environmental Internal Failure Cost*)

Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Contoh aktivitas kegagalan internal adalah pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan.

4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*Environmental External Failure Costs*)

Biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah kedalam lingkungan. Contoh aktivitas kegagalan eksternal adalah membersihkan tanah yang tercemar, menyelesaikan klain kecelakaan pribadi (yang berhubungan dengan lingkungan), merestorasi tanah ke keadaan alamiah hilangnya penjualan karena reputasi lingkungan yang buruk, menggunakan bahan baku dan listrik secara tidak efisien, menerima perawatan medis karena polusi, hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran, hilangnya manfaat danau sebagai tempat rekreasi, dan rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat.

Limbah

Limbah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Adanya berbagai sarana pelayanan kesehatan baik rumah sakit, klinik maupun puskesmas, akan menghasilkan limbah baik cair maupun padat. Limbah pada rumah sakit/puskesmas lebih dikenal dengan pengertian sampah rumah sakit. Limbah padat (sampah) adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, dan umumnya bersifat padat (Departemen Kesehatan, 2004).

Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1204/Menkes/SK/X/2004, limbah padat Rumah Sakit/Puskesmas adalah semua limbah yang berbentuk padat akibat kegiatan operasional yang dilakukan yang terdiri dari limbah medis dan non medis, yaitu:

1. Limbah non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan diluar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman, dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologi. Penyimpanannya pada tempat sampah berplastik hitam.
2. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari:
 - a. Limbah infeksius dan limbah patologi, penyimpanannya pada tempat sampah berplastik kuning.
 - b. Limbah farmasi (obat kedaluarsa), penyimpanannya pada tempat sampah berplastik coklat.
 - c. Limbah sitotoksis adalah limbah berasal dari sisa obat pelayanan kemoterapi. Penyimpanannya pada tempat sampah berplastik ungu.
 - d. Limbah medis padat tajam seperti pecahan gelas, jarum suntik, pipet dan alat medis lainnya. Penyimpanannya pada *safety box/container*.
 - e. Limbah radiotaf adalah limbah berasal dari penggunaan medis ataupun riset di laboratorium yang berkaitan dengan zat-zat radiotaf. Penyimpanannya pada tempat sampah berplastik merah.

Limbah padat medis dapat dikelola dengan menggunakan *incinerator*. *Incinerator* adalah suatu alat pembakaran sampah yang dioperasikan dengan menggunakan teknologi pembakaran suhu tertentu, sehingga sampah dapat terbakar

habis sampai menjadi debu. *Incinerator* merupakan sebuah alat khusus menyerupai tungku yang digunakan untuk membakar limbah padat dengan suhu tinggi. Limbah-limbah padat tersebut kemudian dimasukkan ke dalam *incinerator* dan dibakar selama dua jam dengan suhu 1.200^o *celcius* dan menghabiskan 30 liter minyak tanah tiap kali pembakaran.

3. Limbah cair rumah sakit/puskesmas adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit/puskesmas, yang kemungkinan mengandung mikroorganisme bahan beracun, dan radio aktif serta darah yang berbahaya bagi kesehatan. Penanganannya melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) (Departemen kesehatan RI 2006). Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air buangan yang berasal dari kegiatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu sistem IPAL yang telah banyak digunakan pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan adalah IPAL dengan sistem biofilter anaerob aerob.

Menurut Indrawati dan Rini (2018), aktivitas penanganan limbah dilakukan dengan beberapa metode sesuai dengan jenis limbahnya, yaitu:

1. Metode Penanganan Limbah Padat Medis:
 - a. Pengumpulan
 - b. Pengangkutan
 - c. Pemusnahan
2. Metode Penanganan Limbah Padat Non Medis:
 - a. pengumpulan
 - b. Pengangkutan
3. Metode Penanganan Limbah Cair:
 - a. Pengumpulan
 - b. Pembuangan

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam penelitian kualitatif masalah yang dibawah oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks dan dinamis. sehingga masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan (Sugiyono, 2018:52).

Ruang Lingkup Penelitian

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dan kualitatif. Jenis data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan sedangkan jenis data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal yang tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan/angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan anggaran pengelolaan limbah medis tahun 2017- 2020, sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran mengenai objek penelitian dan pengamatan secara langsung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2018:104), sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data primer dalam penelitian ini yaitu pengamatan secara langsung dan wawancara mendalam sedangkan data sekunder yaitu bukti Perjanjian Kerja Sama (PKS), laporan anggaran pengelolaan limbah medis, Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), visi/misi Dinas Kesehatan Kota Kupang, dan struktur organisasi.

Fokus Penelitian

Berfokus terhadap aktivitas-aktivitas pengelolaan limbah Dinas Kesehatan Kota Kupang yang meliputi aktivitas penanganan pengelolaan limbah medis, penanganan pengelolaan limbah non medis, dan penanganan limbah cair. Berfokus pada perencanaan anggaran terkait kegiatan atau aktivitas pengelolaan limbah sampai pada pelaporan anggaran pengelolaan limbah puskesmas/Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian kualitatif sampel sumber data disebut dengan informan, dikarenakan penentuannya tidak diambil secara random, tetapi diambil *purposive* dan *snowball*, sehingga namanya *purposive snowball simpling*. *Purposive simpling* adalah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan atas

pertimbangan tertentu. Pertimbangannya adalah orang yang mampu menguasai informasi dari objek yang diteliti. *Snowball simpling* adalah sampel yang jumlahnya semakin lama semakin besar dan juga dipilih secara *purposive*. Jumlah sampel serta siapa yang akan digunakan untuk sampel informan, akan berkembang selama dilapangan, dan pengambilan sampel akan dihentikan kalau datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2018:24).

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung terkait dengan aktivitas- aktivitas pengelolaan limbah.

2. Wawancara

Peneliti melaksanakan tanya jawab langsung kepada pihak puskesmas/Dinas Kesehatan Kota Kupang, terkait dengan aktivitas pengelolaan limbah dan perencanaan anggaran pengelolaan limbah.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan bukti, catatan atau dokumen yang terkait dengan aktivitas penanganan limbah dan anggaran biaya lingkungan pengelolaan limbah. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan anggaran pengelolaan limbah, bukti PKS, bukti SOP, RPJMD, visi/misi dan struktur organisasi. Dokumen-dokumen tersebut, peneliti peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Kupang, puskesmas dan media masa online.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. (Sugiyono, 2018:130) analisis data dilakukan dengan melihat mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan sehingga mudah dipahami. Penelitian kualitatif yang digunakan yaitu teknik analisis data model Miles dan Huberman (1984). Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan empat komponen yang meliputi pengumpulan data (*data collection*), reduksi data

(*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*, (Sugiyono, 2018:134).

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*). Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*).
2. Reduksi Data (*Data Reduction*) Mereduksi data berarti merangkum/memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal penting serta dicari tema dan polanya.
3. Penyajian Data (*Data Display*). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplaykan data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan Kesimpulan/verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*) Langkah ke empat pada analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi/ gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aktivitas Pengelolaan Limbah Medis dan Non Medis

Hasil penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa penanganan pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang, yaitu hanya penanganan pengelolaan limbah medis yang biasa dikenal dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan untuk penanganan limbah non medis tidak ada penanganan langsung dari pihak Dinkes terhadap setiap puskesmas yang ada di Kota Kupang, dikarenakan untuk penanganan limbah non medis tersebut, penanganannya dilakukan langsung oleh setiap puskesmas masing-

masing. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:

“ Limbah itu satu. Tidak semua limbah di butuhkan anggaran untuk dialokasikan. Limbah non medis ditampung dan kemudian petugas dari Dinas Kebersihan datang angkut atau sampahnya dibakar, yang butuh penanganan khusus hanya limbah medis. Limbah medis cair disalurkan dalam bentuk septik teng yang dikubur langsung dalam tanah ada juga dalam bentuk Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan limbah medis di tampung kemudian diangkut oleh pihak ke 3 (Pak L.D) ”.

Proses aktivitas yang telah dilaksanakan untuk penanganan limbah yang dihasilkan itu dimulai dari proses pemilahan, pengumpulan atau penampungan, pengangkutan serta pemusnahan. Kegiatan-kegiatan inilah yang dilakukan langsung oleh setiap puskesmas yang ada di Kota Kupang. Sedangkan penanganan dari pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang hanya sebagai manajemennya yang mengontrol atau mengawasi, memonitoring dan mensupervisi setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh setiap puskesmas yang ada di Kota Kupang. Kegiatan pengontrolannya biasanya dilakukan sebulan sekali atau bahkan lebih. Apabila terdapat permasalahan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka disinilah tanggungjawab dari Dinkes Kota Kupang juga, untuk melihat dan mencari tahu permasalahan tersebut dan mendiskusikan kembali dengan pihak puskesmas yang mengalami permasalahan tersebut untuk ditindak lanjut agar tidak terjadi masalah yang sama dikemudian hari. Permasalahan yang pernah dilakukan itu seperti dalam proses pemilahan dan pengelolaan limbah secara sederhana di puskesmas. Dimana pengepakannya tidak sesuai, penampungannya juga tercampur tidak sesuai dengan tempatnya. Masalah ini terjadi pada beberapa tahun yang lalu dan karena sudah adanya kegiatan pelatihan bagi karyawan maka masalah-masalah tersebut sudah berkurang dan bahkan tidak ada lagi masalah yang sama hingga pada tahun ini. Dengan adanya permasalahan tersebut untuk sanksi yang di dapat tidak ada. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai maka tugas dari Dinas Kesehatan Kota Kupang adalah memonitoring dan supervisi yaitu turun langsung, melihat dan mencari tahu ketidaksesuaian tersebut. Kemudian dibuat kesepakatan di bulan berikut atau di buat surat peringatan untuk kepala puskesmas yang bersangkutan. Tetapi sampai

pada saat ini setiap kali mendapatkan ketidaksesuaian tersebut. Pihak dari Dinas Kesehatan Kota Kupang langsung pergi ke puskesmas untuk melihat dan membimbing langsung pada hari itu juga sehingga tidak ada lagi surat-menyurat yang dibuat. Berikut hasil kutipaninformen:

“ Pada tahun-tahun kemarin belum ada pemusnahan sampah kami bakar yang basah karena kalau taru terlalu lama dapat mengeluarkan bau yang tidakenak. Pembakarannya di tempat biasa dalam bentuk bak biru tertutup. Sebenarnya 1x24 jam harus angkut karena limbah B3 ini ada setiap hari. Pengangkutan dari pihak ke 3 juga tidak tentu kadang 3/6 bulan sekali. Kita juga punya TPS tapi belum ada pendinginnya jadi kalau simpan lama akan menimbulkan bau yang tidak enak jadi harus cepat dimusnahkan. Kendalanya kami juga petugas khusus penanganan limbah tidak ada, jadi kami minta tolong teman laki-laki untuk bantu kami karena mereka yang sudah dilatih untuk sementara (Ibu E.N) ”.

“ Dalam SOP yang ada itu memang harus sesuai dengan regulasi yang ada bahwa sampah harus diangkut 1x24 jam, tapi kami kendala di pemusnahan karena pemusnahan itu mereka tunggu sampai sampahnya 50 kg baru mereka datang angkut, jadi kami kesulitan karena walaupun sudah di disinfektan tapi kalau disimpan terlalu lama akibatnya akan menimbulkan bau. Tapi kami sudah berusaha mengurangi teriko kontaminasi dengan petugas, dari pada simpan terlalu lama dan mengakibatkan bau dan mengakibatkan pencemaran jadi kami melakukan pencegahan dengan membakar manual dan dibakarnya dalam bak biru yang tertutup dan ada corongnya juga (Ibu R.B) ”.

“Dinkes adalah manajemennya, kalau seandainya SOP di Puskesmas tidak berjalan dengan baik maka kami mulai melihat dan mencari tahu, jadi ketika puskesmas mengalami masalah atau ada butuh apa sesuatu Dinkes siap tangani. Kami hanya sebagai monitoring siapkan alat dan bahan seperti bullpen, buku, lebtop turun menanyakan persoalan apa kemudian pulang buat laporan selesai.

Kemudian proses pengawasan juga kami lakukan salah satunya melihat secara langsung proses pengangkutan/pemusnahan oleh pihak ke 3 (Pak G.B)''.

Limbah yang dihasilkan oleh setiap puskesmas seperti limbah padat medis, limbah padat non medis dan limbah cair. Limbah yang telah dihasilkan oleh setiap puskesmas sebelum diolah dilakukan pemisahan sesuai dengan jenis limbahnya. Penanganan limbah dilaksanakan dengan beberapa metode sesuai dengan jenis limbahnya, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pengelolaan Limbah Padat Medis

a. Pemilahan

Semua jenis limbah yang dihasilkan sebelum dikumpulkan dilakukan pemilahan/pemisahan. Sistem pemilahan dilaksanakan berdasarkan limbah medis dan non medis (infeksius dan non infeksius). Tempat limbahnya diberikan label-label, sehingga petugas tahu untuk membuang limbahnya berdasarkan jenisnya. Hasil observasi dilapangan, tempat limbah non medis terdiri dari tempat limbah plastik biasa untuk bekas perban, kapas, kertas dan lain sebagainya, sedangkan tempat limbah medis seperti dari tempat khusus *safety box* untuk bekas jarum suntik, botol infus dan lain sebagainya. Proses pemilahan ini dilaksanakan untuk mempermudah petugas Kesehatan Lingkungan (sanitarian) untuk menangani limbah-limbah yang dihasilkan sehingga pada proses tahap selanjutnya dapat menjadi lebih mudah. Tempat sampah di ruang pelayanan kesehatan wajib memenuhi Standar Menteri Kesehatan seperti yang ada di dalam dibersihkan.

b. Pengumpulan

Semua jenis limbah medis di buang pada tempat sampah plastik berwarna kuning tertutup yang sudah dialasi dengan kantong plastik berwarna kuning dan diberi label di atas bertuliskan sampah infeksius (sampah medis). Kegiatan pengumpulan limbah medis dilaksanakan setiap hari oleh petugas masing-masing ruangan penghasil limbah medis.

c. Pengangkutan

Pengangkutan yang dilakukan dengan menggunakan kereta sampah atau diangkat seperti biasa di dalam plastik kemudian ditaruh di tempat pembuangan sementara (TPS). Pengangkutan selanjutnya oleh pihak ke 3 untuk di musnahkan. Pada tahun 2018 pengangkutannya dilakukan oleh pihak dari

Dinas Kesehatan Kota Kupang dengan menggunakan mobil pick up plat merah ke RS.St Carolus Baromeus, pada tahun 2019 dan 2020 ini pengangkutannya dilakukan dari pihak ke 3 dalam hal ini PT. Sagraha Satya. Sawahita. Berikut hasil kutipan dariinformen:

“ Tahun 2018 kami melakukan PKS dengan RS. Carolus Barommeus, dimana kami menggunakan mobil pikap berplat merah untuk mengangkut limbah medis ke tempat pembakaran tersebut. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 ini kami mendapatkan surat deskresi dari kementerian yang menyatakan bahwa boleh melakukan penanganan pengelolaan limbah B3 untuk pengangkutan dan pemusnahannya dengan pihak ke 3 adalah PT. Sarana Agra Gemilang KSO PT. Semen Kupang. Proses pengangkutannya menggunakan mobil khusus yang telah mendapatkanijin (Pak G.B)''.

“ Pengangkutannya juga tidak tentu kadang 3-6 bulan sekali baru dari pihak ke 3 datang angkut. Jadi mereka kadang tunggu sampe sampahnya beratnya 50kg lebih dulu baru datang angkut, sehingga kami juga melakukan pemusnahan sederhana untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran (Ibu E.N)''.

d. Pemusnahan

Pemusnahan limbah medis dengan menggunakan *incinerator*. Ada tiga puskesmas di Kota Kupang ini yang memiliki *incinerator mini* yaitu puskesmas Bakunase, puskesmas Sikumana dan puskesmas Pasir Panjang tetapi mesin ini belum bisa digunakan dikarenakan belum mendapatkanperijinan dari pusat. Oleh sebab itu pada tahun 2019 dan 2020 Dinas Kesehatan Kota Kupang melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak ke 3 dantelah mendapatkan ijin dalam hal ini PT.Sarana Agra Gemilang KSO PT. Semen Kupang (Persero), untuk pemusnahan limbah medis. Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan melakukan PKS dengan RS. St. Carolus Barromeus dan pada tahun 2017 ke belakang pemusnahannya dilakukan secara sederhana di masing- masing puskesmas.

2. Metode Penanganan limbah Padat Non Medis

a. Pengumpulan

Semua jenis limbah non medis dibuang ke tempat sampah plastik tertutup berwarna abu-abu, yang telah dialasi dengan kantong plastik berwarna hitam dan diberi label diatas bertuliskan sampah non infeksius (bukan sampah medis), sampah tersebut dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS).

b. Pengangkutan

Pengangkutan yang dilaksanakandengan menggunakan kereta sampah atau diangkut seperti biasa dari plastik kemudian di taruh di TPS, kemudian pengangkutan selanjutnya oleh DinasKebersihan Kota Kupang untuk di buang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:

“ Untuk sampah non medis ini kami kami tampung di TPS, kalau sudah terlalu penuh kami bakar seperti biasa, kadang juga pihak dari Dinas Kebersihan datang dan angkut untuk di buang ke TPA (Ibu E.N)”.

Biaya Pengelolaan Limbah Medis dan Non Medis

Alokasi anggaran pengelolaan limbah medis dari Dinas kesehatan Kota Kupang sendiri terhadap setiap puskesmas yang ada di Kota Kupang baru saja ada alokasi anggarannya sejak empat tahun terakhir ini, yang terhitung dari tahun 2017, 2018, 2019 hingga pada tahun 2020. Sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya anggarannya didapat dari setiap masing-masing puskesmas yang dari setiap pelayanan jasa yang dilakukan, yang hasil pelayanannya kemudian di alokasikan sebagiannya untuk anggaran pengelolaan limbah medis. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:

“ Pada tahun 2016 hingga tahun-tahun sebelumnya, belum ada alokasi anggaran khusus untuk limbah medis itu masih dikelola oleh masing-masing internal puskesmas, yang ada anggaran alokasi dana untuk pengelolaan limbah medis yaitu sejak tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 ini (Pak L.D)”.

Anggaran biaya pengelolaan limbah oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang hanya menganggarkan untuk anggaran pengelolaan limbah medis/limbah B3 sedangkan untuk limbah non medisnya ditangani langsung oleh pihak dari puskesmas masing-masing. Alokasi anggaran

biaya pengelolaan limbah medis ini baru ada sejak tahun 2017 hingga pada tahun 2020. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:

“ Tidak semua limbah dibutuhkan anggaran, yang butuh anggaran khusus hanya penanganan limbahmedis saja. Tahun 2016 ke belakang itu belum ada alokasi anggaran khusus untuk limbah medis, itu masih di kelola oleh masing-masing internal puskesmas, yang ada anggaran khusus untuk pengelolaan limbah medis yaitu baru ada sejak tahun 2017-2020. Anggaran transport pengelolaan sampah medis ontonya biaya untuk petugas yang ambil sampah dari puskesmas pembantu (Pustu) kemudian dibawah ke puskesmas, ada biaya transport di situ. Kemudian untuk pelatihan bagi tanaga kerja/karyawan untuk dilatih bagaimana cara penanganannya. Dinkes juga diberikan anggaran untuk biaya transport dari Dinkes ke puskesmas untuk melakukan supervisi atau monitoring tugas dari sanitarian, kemudian ada anggaran untuk pembayaran jasa pihak ke 3 dalam pengangkutan dan pemusnahan limbah medis tersebut (Pak L.D)”.

Berikut anggaran biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah medis:

1. Belanja jasa pihak ke 3 biaya pembakaran sampah medis.

Terlihat bahwa alokasi anggaran biaya belanja jasa pihak ke 3 biaya pembakaran sampah medis per tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan dimana pada tahun 2017 sebesar Rp2.000.000, tahun 2018 sebesar Rp32.225.100, tahun 2019 sebesar Rp75.000.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp123.750.000. sedangkan untuk realisasi anggarannya per tiga tahun terakhir ini, anggarannya tidak terealisasi semuanya, hal ini dikarenakan adanya bermacam-macam permasalahan yang timbul. Pada tahun 2017 anggaran biaya belanja jasa pihak ke 3 biaya pembakaran sampah medis tidak terealisasi dikarenakan permasalahan yang timbul yaitu, dimana lokasi tempat pembakaran sampah limbah medis ini tidak ada dan pada waktu itu pihak dari Dinas Kesehatan Kota Kupang melakukan proses pembakaran sebagiannya dengan RSUD. S.K. Lerik tapi sistemnya semacam titip begitu saja dan kemudian selang berjalannya waktu kegiatan tersebut diketahui

oleh pihak kepolisian kemudian diproses dan dibekukan untuk tidak dilanjutkan lagi.

Pada tahun 2018 Dinas Kesehatan Kota Kupang menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak RS. St. Carolus Barromeus. Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp32.225.100, biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp3.846.250, tercatat bahwa biaya yang dikeluarkan tidak melebihi jumlah anggaran yang disediakan, selisih anggaran dengan realisasi yang dimiliki sebesar Rp28.378.850, sisa anggaran yang cukup besar ini dikarenakan tidak dilanjutkan lagi proses pembakaran sampah medis yang dikarenakan kapasitas mesin *incinerator* dari RS. St. Carolus Barromeus tidak dapat menampung lagi dan mengalami kerusakan mesin tersebut. Anggaran yang tersisa tersebut dialihkan ke kegiatan penunjang yang lain yang ada dalam bidang Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan.

Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kota Kupang menjalin PKS dengan pihak PT. Sarana Agra Gemilang KSO PT. Semen Kupang (Persero) dan PT. Sagraha Satya Sawahita. Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp75.000.000, biaya yang telah dikeluarkan sebesar Rp54.947.700, tercatat bahwa biaya yang dikeluarkan tidak melebihi jumlah anggaran yang disediakan, selisih anggaran dengan realisasi yang dimiliki sebesar Rp20.052.300, sisa anggaran yang cukup besar ini dikarenakan terbenturnya jadwal dari PT. Sarana Agra Gemilang KSO PT. Semen Kupang (Persero) dan PT. Sagraha Satya Sawahita yang disebabkan oleh padatnnya penanganan yang dilakukan, dikarenakan pihak PT. Sarana Agra Gemilang KSO PT. Semen Kupang (Persero) dan PT. Sagraha Satya Sawahita sendiri banyak menjalin PKS tidak hanya Kota Kupang saja tetapi setiap kabupaten yang ada juga di Provinsi NTT ini. Anggaran yang tersisa tersebut dialihkan ke kegiatan penunjang yang lain yang ada dalam bidang penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan

Pada tahun 2020 ini Dinas Kesehatan Kota Kupang masih menjalin PKS dengan PT. Sarana Agra Gemilang KSO PT. Semen Kupang (Persero) dan manajemennya, yang mengontrol atau mengawasi, memonitoring dan mensupervisi setiap kegiatan/aktivitas penanganan limbah yang dilaksanakan oleh setiap puskesmas yang ada di Kota Kupang. Aktivitas penanganan limbah cair, limbah padat medis/non medis sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.No.1204/Menkes/SK/X/2004 tentang, Persyaratan Kesehatan Lingkungan, yaitu limbah non medis dikumpulkan pada tempat sampah

berplastik hitam kemudian limbah medis dapat dikelola dengan menggunakan alat pembakaran sampah (*incinerator*), dan limbah cair penanganannya melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Made Indrawati, dkk (2018), hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dalam penanganan limbah ada terdapat tiga metode pengelolaan limbah yang harus dilakukan sesuai dengan jenis limbahnya dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.No.1204/Menkes/SK/X/2004 yaitu:

- 1) Limbah padat medis dengan aktivitas yang dilakukan seperti, pengumpulan limbahnya di tempat sampah, yang dialasi kantong plastik berwarna kuning, dan pemusnahannya menggunakan *incinerator*,
 - 2) limbah non medis dengan aktivitas yang dilakukan seperti, pengumpulan limbahnya dengan dialasi kantong plastik berwarna hitam dan disimpan ke tempat pembuangan sementara (TPS) kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA),
 - 3) limbah cair dengan aktivitas yang dilakukan seperti, pengumpulan limbahnya menggunakan container berbahan kuat dan pemusnahannya menggunakan Intalasi Pengelolaan AirLimbah (IPAL).
- 2) Limbah padat medis dengan aktivitas yang dilakukan seperti, pengumpulan limbahnya di tempat sampah, yang dialasi kantong plastik berwarna kuning, dan pemusnahannya menggunakan *incinerator*,
 - 2) limbah non medis dengan aktivitas yang dilakukan seperti, pengumpulan limbahnya dengan dialasi kantong plastik berwarna hitam dan disimpan ke tempat pembuangan sementara (TPS) kemudian dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA),
 - 3) limbah cair dengan aktivitas yang dilakukan seperti, pengumpulan limbahnya menggunakan container berbahan kuat dan pemusnahannya menggunakan Intalasi Pengelolaan AirLimbah (IPAL).

2. Anggaran Biaya pengelolaan Limbah

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anggaran biaya pengelolaan limbah yang dianggarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang baru ada sejak tahun 2017-2020 dan anggaran tersebut hanya untuk penanganan limbah medis/limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Biaya-biaya tersebut, yaitu: 1) Belanja jasa pihak ke 3 biaya pembakaran sampah medis. Biaya ini termasuk dalam biaya pencegahan, yaitubiaya yang dikeluarkan untuk

mencegah diproduksinya limbah/sampah yang merusak lingkungan, seperti melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ke 3 untuk proses pemusnahan/pembakaran sampah medis. Pelatihan pengelolaan limbah medis. Biaya ini juga termasuk dalam biaya pencegahan, seperti melakukan pelatihan bagi tenaga kerja atau petugas agar dalam proses penanganan limbah dapat teratur dengan baik, 3) Transport pengelolaan sampah medis. Biaya ini termasuk dalam biaya kegagalan internal, dikarenakan biaya untuk aktivitas yang dilakukan pada limbah dan sampah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar, seperti proses pengangkutan limbah medis dari puskesmas pembantu (pustu) ke puskesmas, 4) Perjalanan dinas pengangkut sampah medis. Biaya ini juga termasuk dalam biaya kegagalan internal, seperti dalam proses pengangkutan sampah medis ini dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk pengangkutan limbah medis ke tempat pemusnahan limbah dengan menggunakan mobil pick up, 5) Perjalanan dinas supervisi pengelolaan limbah medis. Biaya ini termasuk dalam biaya deteksi lingkungan, yaitu biaya untuk aktivitas pemeriksaan kegiatan (agar ramah lingkungan), pengembangan ukuran kinerja lingkungan dan pelaksanaan pengujian pencemaran, seperti mengontrol atau mengawasi, memonitoring atau mensupervisi setiap aktivitas pengelolaan limbah medis yang dilakukan oleh setiap puskesmas. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Made Indrawati, dkk (2018), hasil penelitiannya tersebut mengungkapkan bahwa ada biaya lingkungan yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah yaitu, 1) biaya pencegahan lingkungan seperti, membuat dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), 2) biaya deteksi lingkungan seperti, pengawasan dan pemeriksaan sampel air limbah untuk IPAL dan uji emisi fisik udara yang disebabkan dari proses pembakaran *incinerator* dan 3) biaya kegagalan internal seperti, biaya pengangkut sampah, biaya pemeliharaan *incinerator* dan IPAL.

KESIMPULAN

Aktivitas lingkungan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Kupang yaitu monitoring dan mensupervisi aktivitas pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh seluruh puskesmas yang ada di Kota Kupang. Penanganan limbah yang ditangani oleh Dinas Kesehatan Kota Kupang hanya penanganan limbah medis/limbah B3, sedangkan untuk limbah non medis dan limbah cair ditangani langsung oleh masing-masing

puskesmas. Penanganan limbah medis/limbah B3 dilakukan dengan menggunakan mesin *incinerator* yang dilakukan kerja sama dengan pihak ke 3 yang sudah berijin. Penanganan limbah non medis langsung ditampung di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kemudian dibakar atau bahkan pihak dari Dinas Kebersihan datang angkut, sedangkan penanganan limbah cair langsung disalurkan dengan menggunakan peresapan biasa dalam bentuk septik tangki dan ada juga menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Dinas Kesehatan Kota Kupang baru melakukan anggaran khusus untuk biaya pengelolaan limbah medis sejak tahun 2017-2020 sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya anggarannya dari masing-masing internal puskesmas. Ada lima bentuk anggaran yang dialokasikan oleh Dinkes Kota Kupang yaitu, 1). Anggaran belanja jasa pihak ke 3 biaya pembakaran sampah medis. 2). Anggaran biaya pelatihan pengelolaan limbah medis. 3). Anggaran biaya transport pengelolaan sampah medis. 4). Anggaran biaya perjalanan dinas supervisi pengelolaan limbah medis. 5). Anggaran biaya perjalanan dinas pengangkut sampah medis. Peneliti dapat menyarankan beberapa hal, diantaranya:

1. Bagi pihak Dinas Kesehatan Kota Kupang, jika ingin meningkatkan penerapan akuntansi lingkungan dengan lebih baik lagi, Dinas Kesehatan Kota Kupang wajib membuat laporan biaya lingkungan sederhana yang dapat mengungkap seluruh biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah untuk lebih terperinci. Laporan biaya lingkungan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pihak manajemen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan limbah. Diharapkan agar Dinas Kesehatan Kota Kupang membuat laporan anggaran khusus berkaitan dengan biaya lingkungan sehingga bisa mengetahui sejauh mana pengelolaan limbah yang telah dilakukan sehingga sesuai dengan perencanaan yang telah dianggarkan sebelumnya.
2. Diharapkan juga agar Dinas Kesehatan Kota Kupang dapat melakukan pengadaan mesin *incinerator* dengan memiliki kapasitas yang besar, sehingga dapat memberikan manfaat besar salah satu contohnya dapat mengurangi biaya dan bisa menambah kas daerah, dengan cara mesin yang ada tersebut bisa dipergunakan dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk penggunaan mesin *incinerator* tersebut, yang biayanya

kemudian akan menambah pendapatan kas daerah.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan agar menambahkan objek penelitian berkaitan dengan dampak kinerja lingkungan pada masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Kota Kupang "Profil Kesehatan Kota Kupang". Tersedia pada www.dinkeskotakupang.web.id, diakses pada tahun 2017.
- Departemen Kesehatan RI, 2004. Kemenkes RI No.1204/Menkes/SK/X/2004. Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, [hmps://kemkes.go.id](https://kemkes.go.id), diakses pada 20 Januari 2020.
- Departemen Kesehatan RI, 2006. Kepmenkes RI No.1428/Menkes/SK/XII/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, <https://kemkes.go.id>, diakses pada 20 Januari 2020.
- Emy, Lconita dan Beny Yulianto. (2014). Pengelolaan Limbah Medis Padat Puskesmas Se-Kota Pekanbaru. Jurnal. STIKES Hang Tuah Pekanbaru, Vol. 9, No. 2, Januari 2018.
- Fika, Erisya Islamey. (2016). Perlakuan Akuntansi Lingkungan Terhadap Limbah Rumah Sakit Paruh Jember. Jurnal: Universitas Muhamadiyah Jember, Vol. 4, No. 1, Juli 2016.
- Hansen, dan Mowen. (2009). Akuntansi Manajemen. Edisi 8. Jakarta. Salemba Empat.
- Hamdani, (2016). Good Corporate Governance: Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis. Mitra Wacana Media. Aw ri 8ri beruarsi/S I-klhk imbah dis-seluruh
- Indonesia-capai-242-ton-per-hari diakses pada 18 Mci 2020. pom ' 1 20 9062 Lo bkian mn - bagaimana-mengatasinya/ diakses pada 18 Mci 2020.
- Ikhsan, Arfan. (2009). Akuntansi Manajemen Lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Miva Sari. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Daya Makasar. Jual: Universitas Bosowa Makasar, Vol. 3, No. 1, Januari 2017,
- Ni. Made Indrawari dan I G A Saputra Rini. (2018). Analisis Pencrapan Akuntansi Lingkungan Pada Badan Rumah Sakit Umum Dacrah (BRSUD) Tabanan. Jurnal: KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 2, Januari 2018.
- pertumbuhan Jumlah Penduduk Indonesia, <https://www.bps.yo.id>, diakses 23 Januari 2020.
- Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Kesehatan Kota Kupang, (2017, 2018, 2019). Kota Kupang Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kota Kupang.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor : 6 Tahun 2008. Sugiyono, (2016). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta. Sugiyono, (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Novalia, Eka Nur Nazila, Elly Purwanty, Wahyu Prihanta. (2017). Analisis Pengelolaan Sampah Medis Padat Puskesmas Di Kota Malang. Jurnal: Universitas Muhamadiyah Malang, Vol. 3, No. 1, April 2017.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pngclopediaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**PENGARUH *LOCUS OF CONTROL*, INDEPENDENSI, DAN KOMPETENSI
DALAM MENDETEKSI *FRAUD* (STUDI KASUS PADA
BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT)**

Maria Chemy Astary

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana
chemy@gmail.com

Yohana Febiani Angi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana
yfangi@staf.undana.ac.id

Maria I. H. Tiwu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana
indrianitiwu@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *locus of control*, independensi, dan kompetensi dalam mendeteksi *fraud*. Penelitian ini dilakukan pada pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi NTT. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 34 auditor. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program aplikasi SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *locus of control*, dan independensi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemeriksa dalam mendeteksi *fraud*, sedangkan kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap kemampuan pemeriksa dalam mendeteksi *fraud*. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa *locus of control*, independensi, dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemeriksa dalam mendeteksi *fraud*, dengan koefisien determinasi sebesar 45,7%.

Kata kunci : *Locus Of Control, Independensi, Kompetensi, Fraud, Auditor*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of locus of control, independence, and competence in detecting fraud. This research was conducted on examiners at the State Audit Board of the Province of NTT. The number of samples studied were 34 examiners. Data collection was done by using a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS 26 application program. The results show that the locus of control and partial independence does not have a significant effect on the examiner's ability to detect fraud, while competence is partially affect the ability of examiners in detecting fraud. The results of the F test (simultaneously) show that locus of control, independence, and competence together have a significant effect on the examiner's ability to detect fraud, with a coefficient of determination of 45.7%.

Keywords : *Locus Of Control, Independence , Competence, Fraud, Auditor*

PENDAHULUAN

Era reformasi membuka peluang bagi pembangunan institusi BPK agar dapat berperan dalam penegakan transparansi fiskal sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk pengawasan terhadap keuangan negara, pemerintah membentuk lembaga yang diberi nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK sendiri merupakan lembaga negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan, dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara dan hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemeriksa, tentunya tidak akan asing dengan yang namanya tindakan kecurangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, menjelaskan bahwa pemeriksa harus mengidentifikasi factor risiko kecurangan, dan menilai risikoadanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*), dan/atau ketidakpatuhan (*abuse*).

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), menjelaskan bahwa *fraud* merupakan suatu upaya yang melanggar ketentuan hukum, yang dilakukan secara sengaja dengan berbagai tujuan tertentu, seperti untuk memanipulasi ataupun membuat laporan keuangan yang salah kepada pihak tertentu. Di Indonesia pada tahun 2019, ACFE telah melakukan penelitian kedua kali tentang *Survei fraud* Indonesia (SFI). Hasil *survey* menunjukkan bahwa *fraud* yang paling merugikan di Indonesia adalah Korupsi. Secara berurutan sebanyak 167 responden atau 69.9% menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan *fraud* yang paling merugikan di Indonesia. Urutan berikutnya sebanyak 50

responden atau 20.9% menyatakan bahwa penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan perusahaan yang menyebabkan kerugian. Sedangkan yang ketiga sebanyak 22 responden atau 9.2% menyatakan *fraud* laporan keuangan yang menyebabkan kerugian (*Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) Indonesia, 2020). Hasil *survey* ini menunjukkan bahwa sejauh ini kecurangan sering terjadi, dimana korupsi menempati urutan teratas. Berdasarkan hal ini, maka seorang auditor dituntut untuk lebih waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan kecurangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, BPK sangat banyak sekali dihadapkan dengan kasus *fraud* yang semakin merebak di Indonesia, dalam beberapa tahun ini banyak kasus yang masih belum terselesaikan dan dapat titik terangnya baik dari kasus kecil hingga kasus yang besar. Oleh karena itu diperlukannya upaya untuk mendukung kemampuan auditor dalam hal mendeteksi *fraud* yang dapat terjadi dalam auditnya, auditor perlu untuk mengerti dan memahami kecurangan, jenis, karakteristiknya, serta cara untuk mendeteksinya. Dalam mendeteksi *fraud*, setiap auditor memiliki bakat yang berbeda-beda dalam hal menemukan kecurangan. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya *locus of control*, independensi, dan kompetensi.

Menurut Rotter (1966) (dalam Hidayah & Haryani, 2006) *Locus of control* (LOC) adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan (*control*) peristiwa yang terjadi padanya. Didalam konteks penelitian ini, *locus of control* diartikan sebagai sejauh mana seorang pemeriksa mampu untuk mengendalikan stress pada dirinya dan tidak melibatkan masalah pribadinya kedalam pekerjaan.

Mulyadi (2013:14) berpendapat bahwa independensi adalah suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung orang lain. Auditor harus mempunyai sikap mental independen. Sekalipun ia seorang hli, apabilatidak mempunyai sikap independen

dalam mengumpulkan informasi untuk menemukan kecurangan akan tidak berguna, sebab informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan tidak akan diungkapkan secara penuh oleh seorang auditor yang telah memihak.

Selain independensi, kompetensi juga harus dimiliki dan dipertahankan oleh pemeriksa. Menurut Wibowo (2011:324), Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan dan tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan sertadidukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian sebelumnya yang dikembangkan oleh Simanjuntak (2015) tentang Pengaruh Independensi, Kompetensi, Skeptisme Profesional Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (*Fraud*) Pada Auditor Di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang diuji, dan penggantian objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih variabel *Locus of control*, Independensi, dan Kompetensi sebagai variabel bebas. Selain itu, objek penelitian dalam penelitian ini adalah auditor pada kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh *locus of control*, independensi, dan kompetensi dalam mendeteksi *fraud*?

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Menurut

Robbins & Judge (2017:211) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: (1) Kekhususan: artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan; (2) Konsensus: jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama; (3) Konsistensi: jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu.

Fraud

Albrecht (2019:6) menyatakan bahwa *fraud* adalah istilah umum dan mencakup beragam cara yang dapat dilakukan oleh kecerdasan manusia, melalui satu individu untuk mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain melalui representasi atau penyajian yang salah. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, *fraud* adalah suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* (2016:11) membuat sebuah bagan yang menggambarkan skema kecurangan dalam dunia kerja yang disebut dengan *fraud tree* atau pohon kecurangan.

Dalam bagan tersebut *ACFE* membagi kecurangan menjadi 3, yaitu: (1) *Corruption* (Korupsi): merupakan kecurangan yang dilakukan seorang karyawan dengan cara menyalahgunakan pengaruhnya didalam perusahaan melalui pelanggaran tugas personal atau tugas dari atasannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara langsung; (2) *Asset Misappropriation* (Penyalahgunaan Aset) Penyalahgunaan aset merupakan tindak kecurangan yang paling mudah untuk dideteksi karena bersifat fisik dan dapat dihitung; (3) *Financial Statement Fraud* (Kecurangan laporan keuangan) Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajer tingkat atas atau eksekutif suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan.

Mendeteksi *Fraud*

Pada dasarnya tindak *fraud* dapat dibongkar oleh auditor karena adanya indikasi awal serta perencanaan yang baik untuk menyingkap segala sesuatu mengenai tindak kecurangan yang mungkin terjadi, tim audit serta auditor harus memiliki intuisi yang tajam melihat berbagai aspek laporan keuangan auditee yang rawan terjadi kecurangan. Menurut Kumaat (2011:156), mendeteksi *fraud* adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan (yaitu ketika pelaku menyadari prakteknya telah diketahui, maka sudah terlambat untuk berkelit). Kemampuan mendeteksi *fraud* diartikan sebagai sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai *fraud*.

Locus Of Control

Locus of control pertama kali dikemukakan oleh Rotter (1966), ia menyatakan bahwa setiap orang berbeda dalam menyikapi situasi, dan tergantung pada seberapa besar kontrol diri mereka terhadap perilaku, dan hubungan mereka dengan orang lain serta lingkungan. *Locus of control* atau lokus pengendalian, dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi pada dirinya.

Locus of control terdiri dari dua konstruksi yaitu internal dan eksternal. Individu dikatakan memiliki *internal locus of control*, karena individu tersebut menyakini bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah dibawah kendali dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa didalam diri seseorang tersebut, memiliki potensi yang besar untuk menentukan arah hidupnya, tidak peduli apakah faktor lingkungan akan mendukung atau tidak. Sedangkan individu yang memiliki *external locus of control* merupakan individu yang mempercayai bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah diluar kendali dirinya sendiri.

Independensi

Independensi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki, yang artinya sikap untuk tidak memihak dalam melakukan tugas audit. Sikap independensi merupakan dasar utama kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap profesi akuntan publik, di mana kejujuran seorang auditor sangat diharapkan untuk mempertimbangkan fakta dan kebenaran didalam merumuskan dan menyatakan pendapat sebuah laporan keuangan dan independensi merupakan salah satu faktor yang penting untuk menilai mutu jasa kualitas pekerjaannya. Mulyadi (2013:14) berpendapat bahwa independensi adalah suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung orang lain. Dengan demikian dapat diketahui bahwa sikap independen adalah sikap yang ditunjukkan seseorang tanpa memihak pada pihak tertentu dan mampu mengambil keputusan tanpa tergantung pada pengaruh orang lain. Dalam penerapannya, Independensi memiliki beberapa jenis yang dijelaskan menurut Arens et al., (2013) diantaranya yaitu: (1) *Independence in fact* (independensi senyatanya) Independen senyatanya (*independence in fact*), merupakan sikap independen yang dimiliki oleh seorang auditor, dimana dalam pelaksanaan pencarian bukti audit, pengujian bukti audit, pelaksanaan evaluasi hasil pemeriksaan bukti audit dan penyusunan laporan audit tidak memihak terhadap suatu pihak. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan)

Auditor harus menghapuskan pandangan orang lain yang dapat membuat auditor tersebut diragukan kebebasannya dalam penugasan audit, dimana suatu interpretasi pihak lain mengenai sikap independensi auditor yang disebut dengan Independensi dalam penampilan (*Independence in Appearance*).

Kompetensi

Kompetensi mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan bakat terkait pekerjaan. Kompetensi adalah salah satu kualitas paling

penting yang harus dimiliki auditor, karena akan mempengaruhi tingkat layanan yang disediakan. Efektivitas auditor dalam profesinya sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya untuk mendeteksi penipuan. Auditor dapat melakukan audit yang lebih efektif dan efisien dalam menilai akun keuangan kliennya jika ia memiliki kompetensi tinggi.

Sukrisno (2012:146) berpendapat bahwa kompetensi merupakan suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya, orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penugasan atau pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Variable dalam penelitian ini adalah Locus of Control (X1), Independensi (X2), Kompetensi (X3) dan Mendeteksi Kecurangan (X4). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner atau angket yang disebar secara langsung kepada pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi NTT. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemeriksa pada BPK Provinsi NTT yang berjumlah 124 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *simple random sampling*, dimana setiap populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, dimana menghasilkan sampel dengan jumlah sebanyak 55 orang (dibulatkan) yang merupakan Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi NTT. Adapaun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas, dan uji reliabilitas. Pengujian asumsi klasik menggunakan uji

normalitas, uji Multikolinieritas, dan uji Heterokedstisitas. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda berdasarkan uji signifikansi simultan (F test), uji signifikansi parameter individual (t test), dan uji koefisien determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 34 responden sehingga df diperoleh 32 dengan taraf signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$), didapat $r_{tabel} = 0,349$. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 26. Seluruh item pertanyaan dari masing-masing variable dalam penelitian ini adalah valid ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Pengujian reliabilitas penelitian menggunakan *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS 26. Suatu variable dikatakan reliable jika memberikan nilai koefisien *Alpha* lebih besar daripada 0,60 (Sugiyono, 2016). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,60 maka nilainya kurang baik. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS 26, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variable dalam penelitian ini adalah reliable (*Cronbach Alpha* > 0,60). Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogrov-smirnov test*, yang mana jika di nilai *asym.sig (2-tailed)* > 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.

Tabel 1. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Test Statistic	0,105
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,005. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi. Gejala multikolinieritas ditandai dengan adanya hubungan yang kuat diantara variabel independen dalam suatu persamaan regresi. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10.

Dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas ($VIF < 10$ untuk semua variable bebas).

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas	Tolarence	VIF
<i>Locus Of Control</i> (X_1)	0,869	1,151
Independensi (X_2)	0,449	2,227
Kompetensi (X_3)	0,425	2,352

Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas digunakan uji Glejser. Apabila nilai sig > 0,05, maka data tersebut bebas dari heterokedastisitas. Hasil dari uji heterokedastisitas menggunakan uji *Glejser* dapat diketahui bahwa ketiga variabel independen yaitu *Locus Of Control*, Independensi, dan Kompetensi memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,005 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas pada model regresi.

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel Bebas	Sig.
<i>Locus Of Control</i> (X_1)	0,082
Independensi (X_2)	0,365
Kompetensi (X_3)	0,297

Hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -0,987 + 0,216X_1 + 0,347X_2 + 0,653X_3 + e$$

Terlihat bahwa nilai konstanta persamaan di atas adalah -0,987, angka ini menunjukkan apabila semua variabel bebas (*locus of control*, independensi, dan kompetensi) bersifat tetap maka kemampuan pemeriksa dalam mendeteksi *fraud* mengalami penurunan sebesar 98,7%. Variabel X_1 , *locus of control* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,216 artinya jika *locus of control* (X_1) naik sebesar 1%, maka dalam mendeteksi *fraud* oleh pemeriksa akan meningkat sebesar 21,6% dengan asumsi *ceteris paribus*. Variabel X_2 , independensi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,347 artinya jika independensi (X_2) naik sebesar 1%, maka dalam mendeteksi *fraud* oleh pemeriksa akan meningkat sebesar 34,7% dengan asumsi

ceteris paribus. Variabel X_3 , kompetensi memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,653 artinya jika kompetensi (X_3) naik sebesar 1%, maka dalam mendeteksi *fraud* oleh pemeriksa akan meningkat sebesar 65,3% dengan asumsi *ceteris paribus*.

Uji Hipotesis

Hipotesis secara parsial atau individual (Uji t)

Nilai t_{tabel} diperoleh dari derajat kebebasan $df = n - k - 1$, dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3). Jumlah responden pada penelitian ini adalah 34 dan jumlah variabel independen adalah 3. Pada tingkat signifikansi 5% maka $df = 34 - 3 - 1 = 30$ dengan tingkat signifikansi 2 arah yaitu 0,025, sehingga nilai t_{tabel} pada penelitian ini adalah 2,04227.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Locus of Control* tidak berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* pada pemeriksa. Menurut Rotter (1966:28), *locus of control* atau lokus pengendalian, dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap sesuatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan peristiwa yang terjadi pada dirinya. Dimana hal ini berkaitan dengan cara orang tersebut dalam mengendalikan stress yang terjadi pada kehidupan pribadinya. *Locus of control* tidak berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* pada pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi NTT, hal ini disebabkan karena pemeriksa pada BPK membawa stress akibat permasalahan pribadi kedalam pekerjaan. Akibat daripada hal ini adalah pemeriksa menunjukkan hasil kerja yang kurang baik atau tidak sesuai dengan ketetapan kinerja yang diinginkan oleh intansi. Ini dikarenakan pemeriksa yang tidak memiliki *locus of control* lebih mudah merasa terancam dan tidak berdaya, maka strategi yang dipilih cenderung reaktif. Mereka akan lebih mudah pasrah, dan gampang terpengaruh dari pengaruh luar perusahaan,

dan tidak percaya diri. Inilah yang terkadang membuat pemeriksa tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, dan kinerjanya akan menurun. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari L Al Azhar (2013). Namun, Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Purba & Nuryatno (2019) yang menyatakan bahwa *locus of control* berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua, menunjukkan bahwa Independensi tidak berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* pada pemeriksa. Menurut Mulyadi (2013:26), independensi adalah suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung orang lain. Namun hal ini tidaklah berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* pada pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi NTT. Karena terdapat kemungkinan jika pemeriksa menemui kesulitan ketika mempertahankan sikap mental independennya, yang disebabkan telah lama hubungan dengan klien, selain itu independensi tidak dapat diturunkan hanya dari sikap mental pemeriksa tetapi harus dibangun berdasarkan kesadaran dari masing-masing pemeriksa. Hasil pada penelitian ini didukung oleh penelitian dari Simanjuntak (2015), dan penelitian Presetyo et al., (2019). Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Biksa & Wiratmaja (2016), serta penelitian dari Batul & Ngumar (2019) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan teori agensi, dimana pemeriksa selaku pihak ketiga seharusnya dapat memahami konflik kepentingan yang muncul antara *prinsipal* dan *agent*, dimana diharapkan dalam mengaudit laporan keuangan yang disiapkan oleh manajer perusahaan, pemeriksa mampu mendeteksi kecurangan, dan diharapkan juga pemeriksa bersifat tidak memihak agar tidak melakukan kecurangan dalam mengaudit.

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* pada pemeriksa. Menurut Sukrisno (2012:146) kompetensi merupakan suatu kecakapan dan kemampuan

dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya, orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi

mencakup penugasan/pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemeriksa di BPK, maka semakin tinggi pula kemampuan pemeriksa dalam mendeteksi kecurangan. Seorang pemeriksa yang memiliki sikap kompetensi dalam penugasan auditnya, dapat memudahkannya mendeteksi kecurangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Simanjuntak (2015), dan sejalan dengan teori atribusi. Dimana kemampuan pemeriksa BPK dalam mendeteksi *fraud*, banyak ditentukan oleh atribusi internal, dimana faktor-faktor yang menentukan kemampuan lebih banyak berasal dari dalam diri pemeriksa. Kemampuan dapat dibentuk melalui usaha seseorang misalnya dengan pencarian pengetahuan, dan peningkatan kompetensi.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 10,275 dengan nilai $F_{tabel} = 3,32$, sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,005$. Berarti variabel *Locus Of Control* (X_1), Independensi (X_2), dan Kompetensi (X_3) secara bersamaan berpengaruh dalam mendeteksi *fraud* pada pemeriksa BPK Provinsi NTT dalam mendeteksi *fraud*.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R Square
0,457

Berdasarkan table 4, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,457 atau 45,7%. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi perubahan terhadap variabel mendeteksi *fraud* (Y), mampu dijelaskan oleh

variabel *Locus Of Control* (X_1), Independensi (X_2), dan Kompetensi (X_3) sebesar 45,7%. Sisanya sebesar 0,543 (1- 0,457) atau 54,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti skeptisme profesional, tekanan, anggaran waktu, *red flags*, dan sebagainya yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Locus Of Control, dan Independensi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemampuan pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam mendeteksi *fraud*. Sebaliknya, kompetensi berpengaruh secara parsial terhadap kemampuan pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam mendeteksi *fraud*. Secara simultan *Locus Of Control*, Independensi, dan Kompetensi berpengaruh terhadap kemampuan pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam mendeteksi *fraud* sebesar 0,457 atau 45,7%.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016). Report to the Nations On Occupational Fraud and Abuse. *Report to The Ntaion*, 1–92.
- Agoes Sukrisno. (2012). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (4th ed.). Salemba Emmpat.
- Albrecht, S. (2019). *Fraud Examination* (6th ed.). Cengage. https://doi.org/1337930989_9781337930987
- Arens, A. A., Randal, J. E., & Beasley, M. S. (2013). *Auditing & Assurance Services An Integrated Approach* (10th ed.). Prentice Education International.
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. *Acfе Indonesia Chapter*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Batul, H. F., & Ngumar, S. (2019). *Pengaruh Independensi, Pengalaman Dan Kompleksitas Tugas Auditor Terhadap Pendektesian Kecurangan*. <http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/9>
- 46
- De Angelo. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3, 183–199.
- Hidayah, S., & Haryani. (2006). *Peranan Locus Of Control Internal Pada Perilaku Etis Karyawan Di Dalam Organisasi*. 1999(December), 1–6. <https://ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/JEMA/issue/view/23>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kumaat. (2011). *Internal Audit*. Erlangga.
- L, A. A. (2013). Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, Kesan Ketidakpastian Lingkungan, Locus Of Control Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Di Pekanbaru, Padang Dan Batam). *Jurnal Ekonomi*, 21. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/je.21.04.p.%25p>
- Mulyadi, & Kanaka, P. (2013). *Auditing* (6th ed.). Salemba Empat.
- Peuranda, H. J., Hasan, A., & Silfi, A. (2019). *Pengaruh Independensi , Kompetensi dan Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan dengan Pelatihan Audit Kecurangan sebagai Variabel Moderasi*. 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31258/je.27.1.p.1-13>
- Presetyo, M. A., Sukarmanto, E., Maemunah, M., & Akuntansi, P. S. (2019). *Pengaruh Skeptisme Profesional Dan Independensi Terhadap Pendeteksian Kecurangan*. 20(2), 159–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/ka.v20i2.4497>
- Purba, S. F., & Nuryatno, M. (2019). Kecerdasan Emosional Sebagai Pemoderasi Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Time

- Pressure, Locus of Control Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 325–344. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5495>
- Robbins, & Judge. (2017). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Salemba Empat.
- Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Psychological Monographs: General and Applied*, 80, 1–28. <https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/h0092976>
- Sanjiwani, P. M. D. (2016). *Pengaruh Locus Of Control , Gaya Kepemimpinan Dan Komitmen Organisasi Pada Kinerja Auditor*. 920–947.
- Sartika, A. (2015). Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palu. *Katalogis*, 3(1), 54–65.
- Simanjuntak, N. S. (2015). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Skeptisme Profesional Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (Fraud) Pada Auditor Di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1–13. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8836/8504>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (5th ed.). CV Alfabeta.

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA)
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Yabes Edison Nesimnasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

nesimnasieddy@gmail.com

Linda Lomi Ga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

linda.ga@staf.undana.ac.id

Cicilia A. Tungga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan SIMDA keuangan pada Sekretariat Daerah (SETDA) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta mengetahui faktor-faktor penyebab yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah dalam menerapkan SIMDA keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya. Responden dalam penelitian sebanyak 5 orang yang terdiri dari pegawai Sekretariat Daerah yaitu Pegawai Bagian Penatausahaan, Pegawai Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan serta Kepala Bagian. Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara, observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas para pegawai Sekretariat Daerah serta studi dokumentasi atas Wawancara. Hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai Sekretariat Daerah sudah memahami makna SIMDA keuangan serta gambaran pelaksanaannya yang berkaitan dengan input dan output datanya. Faktor-faktor yang dimiliki dalam pelaksanaan penerapan SIMDA keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan yaitu andal, tapi belum tepat waktu serta relevan.

Kata kunci: *Akuntansi, SIMDA Keuangan, Penerapan, Faktor-faktor, Kualitas Informasi.*

ABSTRACT

This study aims to obtain an overview of the implementation of financial SIMDA at the Regional Secretariat (SETDA) of the South Central Timor Regency Government, as well as to find out the causal factors that the Regional Secretariat has in implementing financial SIMDA, as well as the quality of information resulting from its implementation. Respondents in the study were 5 people consisting of Regional Secretariat employees, namely Administrative Section Employees, Accounting and Reporting Section Employees, Head of Finance and Reporting Sub Division and Section Head. Data were collected through direct interviews with respondents using interview guides, direct observation of the activities of the Regional Secretariat employees and documentation studies of related documents. The results of the interviews and the collected data were analyzed by descriptive method using a phenomenological approach. The results of the study indicate that in general the employees of the Regional Secretariat have understood the meaning of financial SIMDA and the description of its implementation related to input and output data. The factors possessed in implementing the implementation of SIMDA Finance are communication, human resources, attitude/disposition and bureaucratic structure, while the quality of information generated from the implementation of SIMDA Finance is reliable, but not timely and relevant.

Keywords: *Accounting, SIMDA Finance, Implementation, Factors, Information Quality.*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik; (i) relevan yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu, (ii) andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (iii) dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya, (iv) dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. (Leatemia dan Usmany, 2021).

Salah satu faktor laporan keuangan yang handal adalah ketepatan waktu untuk menyajikan laporan keuangan. Ketepatan waktu laporan keuangan secara tegas dinyatakan sebagai karakteristik kualitatif penting laporan keuangan. Apabila laporan keuangan disajikan terlambat maka laporan keuangan tersebut akan kehilangan kekuatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu

ketepatan waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan yang dilakukan pemerintah guna memperoleh pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.(DJPK, 2005)

Fenomena Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah suatu hal yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut, pada kenyataannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak keterlambatan dan penyimpangan. Karena itu pemerintah menyarankan untuk menggunakan Aplikasi SIMDA, agar Laporan Keuangan yang dibuat bisa akurat dan tepat waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin memperoleh gambaran lebih jauh tentang

1. Bagaimana penerapan SIMDA keuangan khususnya tentang bagaimana pemahaman pegawai tentang SIMDA Keuangan,
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penerapan SIMDA Keuangan,
3. Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KAJIAN TEORI

Agency Theory

Dalam Teori keagenan (*Agency Theory*) dijelaskan mengenai hubungan antara principal dan agent. Jensen dan MEckling (1976) mengartikan bahwa Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah hubungan yang muncul ketika Satu Pihak (*principal*) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai kepentingan principal. Dalam sektor pemerintahan, masyarakat selaku *principal* memberikan

amanah kepada pemerintah selaku agent. Pemerintah selaku agen yang menjadi pemegang amanah berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dalam teori keagenan yang diterapkan dalam pemerintahan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara Pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai *principal*. Asimetri informasi terjadi ketika Pemerintah memberikan sinyal tentang kondisi dan laporan keuangan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pengungkapan Informasi Akuntansi. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas (Mardiasmo, 2004:24).

Teori Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 (2005) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan PP tersebut pengelolaan harus berdasarkan asas umum pengelolaan keuangan daerah antara lain:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Subarsono, (2005) “implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu komunikasi (*Communications*), Sumber daya (*resource*), Sikap (*disposition*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)”.

Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatiannya untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya secara rinci.

Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penentuan jenis atau metode penelitian merupakan langkah awal dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan fenomenologi, menurut Creswell dalam Sugiyono, (2014) pendekatan fenomenologi adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan jenis ini peneliti melakukan sebuah observasi kepada partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup partisipan tersebut.

Fokus Penelitian

Fokus penulisan dalam penelitian kualitatif ini adalah bagaimana penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan yang akurat.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan serta dokumentasi/arsip perusahaan berupa gambaran umum, struktur organisasi dan *Job Description*

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yang berasal dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada Umumnya Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005). Secara garis besar data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Studi Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan Jumlah Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tahun 2022 sebanyak 134 orang PNS, dengan komposisi PNS sebagai berikut

S2	: 9	Orang
S1	: 45	Orang
D3	: 6	Orang
SLTA	: 70	Orang
SLTP	: 4	Orang

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, informan tersebut adalah para Kepala Bagian, Pegawai/Staf Keuangan yang terkait langsung dengan proses akuntansi di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hal ini untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan.

Data wawancara, data dokumentasi dan data obeservasi langsung yang diperoleh, maka dilakukan kode wawancara (Inisial Responden) yaitu :

1. PAB (Staf pelaksana SIMDA bag. Penatausahaan)
2. PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan)
3. KAA (Kepala Bagian)
4. KAN (Kepala Sub Bagian Penanggungjawab Keuangan).

Selanjutnya dilakukan pemahaman untuk menemukan tema yang ada. Untuk mengetahui pemahaman pegawai tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan sejauh mana keberhasilan penerapan SIMDA Keuangan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten TTS maka ditemukan dua tema yaitu pemahaman makna SIMDA Keuangan dan tujuan penerapan SIMDA Keuangan, Analisis Faktor-faktor Pengaruh dan Kualitas Laporan Keuangan.

Hasil analisis data dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Data Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan

Tema yang ditemukan	Responden	Triangulasi	
		Informasi yang disampaikan	Sumber Data
Pemahaman Makna SIMDA Keuangan	KAA (Kepala Bagian)	Sistem yang berbasis komputerisasi untuk mengolah transaksi-transaksi keuangan	Wawancara, Observasi
Tujuan dan Manfaat SIMDA Keuangan	KAN (Kepala Sub Bagian Penanggungjawab Keuangan)	Dalam sisi Pelaporan 1. Mempermudah proses penyajian RKA, DPA, dan SPD untuk bagian anggaran 2. Memperbaiki sistem pengolahan data keuangan pemerintah	Wawancara, Observasi
Output yang Dihasilkan	PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan)	Terdapat 3 laporan yang dihasilkan dari Simda Keuangan untuk bagian anggaran yaitu RKA, DPA, dan SPD Laporan yang dihasilkan dari pengolahan data SIMDA Keuangan pada bagian akuntansi yaitu buku besar, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan neraca.	Wawancara, Observasi

Tabel 2. Analisis Data Faktor-faktor Pengaruh

Tema yang ditemukan	Responden	Triangulasi	
		Informasi yang disampaikan	Sumber Data
Komunikasi	KAA (Kepala Bagian)	Penerapan SIMDA Keuangan dikomunikasikan terlebih dahulu Sosialisasi tentang penerapan SIMDA Keuangan dilakukan secara bertahap dan kadang-kadang secara tidak langsung	Wawancara, Observasi
Pencatatan Aset	PAB (Staf pelaksana SIMDA bag. Penatausahaan)	Pencatatan atau Pembukuan aset yang belum maksimal	Wawancara, Observasi
Sumber Daya Manusia	KAA (Kepala Bagian)	Tidak ada pelatihan khusus atau diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP Peningkatan SDM melalui diskusi/curah pikir dengan kepala kantor atau sesama pegawai SDM masih kurang dalam jumlah maupun Kapasitas.	Wawancara, Observasi

Disposisi/Sikap	KAA (Kepala Bagian	Sangat setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena lebih memudahkan dalam membuat Laporan Sangat membantu dalam proses Transaksi keuangan dan lebih mengefektifkan waktu	Wawancara, Observasi
Struktur Birokrasi	KAA (Kepala Bagian	Tidak terdapat pengawasan yang baik terhadap SIMDA sehingga kadang terjadi kegagalan sistem Proses Mutasi dan Pelantikan Pegawai yang tidak mempertimbangkan kebutuhan	Wawancara, Observasi
Ketersediaan Jaringan	PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang mana semua pengoperasian berbasis Teknologi internet, terkadang mengalami kendala Internet.	Wawancara, Observasi
Faktor Eksternal	KAA (Kepala Bagian	Psikologi pegawai pengelola keuangan juga secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.	Wawancara, Observasi

Tabel 3. Analisis Data Kualitas Informasi yang Dihasilkan SIMDA Keuangan

Tema yang ditemukan	Responden	Triangulasi	
		Informasi yang disampaikan	Sumber Data
Andal	PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan	Informasi yang dihasilkan dapat Diandalkan	Wawancara, Observasi
Ketepatan Waktu	PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan	Pelaporan keuangan belum dapat dilakukan tepat waktu sesuai <i>deadline</i> yang telah Ditentukan	Wawancara, Observasi
Relevan	PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan	Setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing secara otomatis oleh sistem Setiap menu aplikasi yang terdapat dalam SIMDA Keuangan saling berhubungan	Wawancara, Observasi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan telah diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat dari pemahaman pegawai mengenai SIMDA itu sendiri dan cara penggunaan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan SIMDA Keuangan pada Sekretariat Daerah secara optimal, antara lain:
 - 1) Komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut.
 - 2) Rekonsiliasi Aset yang belum maksimal karena pencatatan yang tidak teratur.
 - 3) Sumber Daya Manusia yang belum memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya.
 - 4) Adanya sikap implementor yang menerima/setuju atas pelaksanaan penerapan SIMDA Keuangan serta dukungan dari kepala kantor/pemimpin.
 - 5) Struktur Birokrasi yang mana proses mutasi dan pelantikan pegawai dalam lingkup Pemda tidak memperhatikan kebutuhan dan tugas pegawai yang ada, sehingga mempengaruhi proses pelaporan keuangan. Serta belum adanya operator khusus yang mengawasi dan mengoperasikan aplikasi SIMDA sehingga terkadang terjadi kegagalan sistem
 - 6) Ketersediaan Jaringan Internet yang terkadang mengalami gangguan sehingga menghambat dalam pengoperasian Aplikasi SIMDA
 - 7) Faktor Eksternal dari pegawai pengelola keuangan sendiri juga sangat berpengaruh pada kualitas kerja di tempat kantor, sehingga mempengaruhi juga kualitas ketepatan waktu laporan keuangan.
3. Kualitas informasi yang dihasilkan dari

penerapan SIMDA keuangan dapat dipertanggung jawabkan dengan kualitas laporan keuangan yang andal namun belum memenuhi syarat ketepatan waktu.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil olah data yang dilakukan maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam penerapan SIMDA Keuangan sebagai sistem komputerisasi pengolahan data keuangan perlu mengembangkan pemahaman pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan serta memahami faktor-faktor penghambat maupun pendukung yang perlu dimiliki oleh instansi tersebut antara lain :
 - 1) Meningkatkan Komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut.
 - 2) Memaksimalkan Rekonsiliasi Aset sehingga pencatatan dapat teratur.
 - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bentuk Pendidikan maupun Pelatihan.
 - 4) Dalam proses mutasi dan pelantikan pegawai dalam lingkup Pemda harus lebih mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan tugas pegawai yang ada, sehingga tidak mempengaruhi proses pelaporan keuangan.
 - 5) Mempersiapkan Operator khusus yang mengawasi dan mengoperasikan aplikasi SIMDA sehingga tidak terjadi kegagalan sistem.
 - 6) Memperkuat Jaringan Internet yang terkadang mengalami gangguan sehingga menghambat dalam pengoperasian Aplikasi SIMDA.
 - 7) Faktor Eksternal dari pegawai pengelola keuangan sendiri menjadi perhatian khusus dari atasan langsung sehingga mengurangi factor yang mempengaruhi kualitas ketepatan waktu laporan keuangan
2. Diharapkan agar Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang

penerapan SIMDA Keuangan menggunakan teknik pengumpulan data lain seperti observasi dan studi dokumen serta pada instansi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G. Subarsono (2005) *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Bahra bin Ladjamudin. (2005) *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asmawi, Syafael, & Yamin, M. (2010) 'Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi', *Jurnal Teknologi Pendidikan*.
- Bambang, W. (2008) *Konsep Sistem Informasi dari BIT sampai ke DATABASE*. Yogyakarta: Andi.
- BPKP (2007) *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta: BKPP.
- BPKP (2008) *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*, web site. Available at: <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/33/versi-2.1.bpkp>.
- Budiman, Fuad dan Arza, F. I. (2013) 'Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah', *Jurnal WRA*.
- Cholih, A. (2011) *Pengantar Manajemen*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa.
- Dewi, N. C. and Mariska, S. (2018) 'Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman', *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 3(1), pp. 63–70.
- Edward, G. C. (1980) *Implementing Public Policy*. Whashington DC: Congressional Quanterly Press.
- Hasibuan, M. S. P. (2009) *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jensen, M., C. and MEckling, W. M. (1976) 'heory o f the firm: Managerial behavior, agency cost a nd ownership structure', *Journal of Finance Economic*, 3, pp. 305–360. Available at: <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensen-%0Ameckling-76.pdf>.
- Jogiyanto, H. . (2005) *Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiono, Arief, Yanuar Nanok Soenarno, and Synthua Madya Kusumawati. 2010. "Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah." Jakarta: Grasino.
- Manangkey, Natasya. 2014. "Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang dan Penerapan Akuntansi Pada PT Cahaya Mitra Alkes." *Jurnal EMBA*, Vol. 2, Hal.1151-1161. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Sam RATulangi, Manado.
- Albercht,W. Steve, Albercht, Conan C., and Albercht, Chad O. 2006. *Fraud Examination Second Edition*. Canada: Thomson South-Western.
- The Institute of Internal Auditors. 2017. "International Standards for The Profesionals Practice of Internal Auditing 2017". Retrieved from <https://na.theiia.org>, on 1st March 2019.
- Kadir, A. (1997) *Tuntunan Praktis Pemrograman Visual dBase 5.5.*. Jakarta: PT.Elex Media koputindo.
- Kadir, A. (2003) *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo (2004) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Menteri Dalam Negeri (2002) *Kep Mendagri Nomor 29 Tahun2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pen, Keputusan Menteri Dalam Negeri*. Jakarta.
- Moleong, L. (2005) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003) 'UU No17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

- Negara', *Journal of Chemical Information and Modeling*. Jakarta, p. 17.
- Pemerintah Republik Indonesia (2004) *UU nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta. Available at: <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.
- Pemerintah Republik Indonesia (2005) *Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Legalitas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (2006) *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta

ANALISIS KINERJA ANGGARAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERODE 2017-2021

Alwin Fedianto Tameon

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
alwintameon93@gmail.com

Sarinah Joyce Rafael

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
joyce.rafael@staf.undana.ac.id

Linda Lomi Ga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
linda.ga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kinerja anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama lima tahun anggaran (2017-2021) dengan konsep pengukuran *value for money* yang terdiri dari tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan teknik penilaian pustaka. Data yang diolah dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2017-2021 untuk rasio ekonomi berada pada kategori cukup ekonomis, dan rasio efisiensi berada pada kategori efisien, sedangkan untuk rasio efektifitas berada pada kategori efektif. Hasil analisis ini menerangkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur baik dalam mengelola keuangannya.

Kata kunci : *Kinerja Anggaran, Value for Money, Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas.*

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the performance of the budget for the Regional Government of East Nusa Tenggara Province for five fiscal years (2017-2021) with the concept of measuring value for money which consists of three main elements, namely economy, efficiency and effectiveness. The type of research used in this study is to use a qualitative descriptive method. Data collection techniques used in this research are documentation techniques and literature assessment techniques. The data processed in this study is a report on the budget realization of the periode year from 2017-2021 for the Province of East Nusa Tenggara. The data analysis technique used in this study are using economic ratios, efficiency ratios, and effectiveness ratios. The results of this study indicate that the financial performance of the Government of East Nusa Tenggara Province for the 2017-2021 for economic ratios is in the quite economical category, and efficiency ratios are in the efficient category, while for effectiveness ratios are in the effective category. The results of this analysis explain that the Regional Government of East Nusa Tenggara Province is good at managing its finances

Keywords : *Budget Performance, Value for Money, Economy, Efficiency, Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Dalam kinerja keuangan daerah yang dilihat adalah dampak dari kinerja keuangan itu sendiri terhadap kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga kategori yang merupakan target pencapaian kesejahteraan masyarakat yakni tentang sejauh mana persoalan sosial yang dapat diatasi, sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, dan sejauh mana kesempatan untuk memperoleh peningkatan taraf hidup (Midgley, 2005). Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, Program Pembangunan PBB melalui terbitan serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif dengan menggunakan tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendidikan dan usia harapan hidup yang dikonstruksi menjadi Indeks Pembangunan Manusia.

Kinerja (*performance*), menurut kamus akuntansi manajemen kontemporer, dikatakan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Tunggal, 1995:126). Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah

dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan otonomi daerahnya dengan tujuan menjamin pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas merupakan tiga elemen utama dalam konsep *Value for money* yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Model *value for money* atau yang dikenal dengan model 3E mengukur kinerja organisasi sektor publik dengan analisis membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan input dan output aktualnya. Ekonomi diukur melalui rasio antara masukan aktual dengan masukan rencana. Efisiensi diukur melalui rasio efisiensi aktual dengan rasio efisiensi yang direncanakan. Efektivitas diukur dengan membandingkan keluaran realisasian (aktual) dengan keluaran menurut rencana (Mardiasmo, 2015:27). *Value for money* dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik. Mengingat pentingnya pengukuran kinerja seperti yang telah diuraikan maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kinerja Anggaran Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021"

KAJIAN TEORI

Agency Theory

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *agency theory*. Supriyono (2018) mengemukakan bahwa *Agency Theory* muncul karena keberadaan hubungan antara

agen dan prinsipal, agen dikontrak untuk melakukan tugas tertentu bagi prinsipal serta mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban untuk memberikan imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen.

Kinerja

Kinerja adalah tabelan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006:274).

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. (Mashun, 2013:25).

Manfaat Kinerja Sektor Publik

Mashun (2013:23) menjelaskan organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian.

Value For Money

Value for money menurut Mardiasmo (2015:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi yaitu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas yaitu

tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Indikator Value for Money

Peranan indikator kinerja pada *value for money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan. Indikator *value for money* menurut Mardiasmo (2015:130) yaitu:

- a. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)

Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik. Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya.

- b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Menurut Mahmudi (2015:89), Indikator Kinerja merupakan konsep yang multi idensial dan kompleks. Indikator kinerja bukan hanya kinerja keuangan saja, tetapi juga indikator nonkeuangan. Indikator keuangan hanya menekankan pada indikator yang berorientasi pada input dan output yang terbatas pada anggaran dan realisasinya. Sementara indikator nonkeuangan, seperti kepuasan pelanggan, kualitas pelayanan, *outcome* pelayanan belum banyak diakomodasi

Manfaat Implementasi Value for Money

Penerapan konsep *value for money* dalam pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang dikehendaki dalam pelaksanaan *value formoney* pada organisasi sektor publik yaitu ekonomi (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dan efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran (Mardiasmo, 2015:130)

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

dari informan yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data sekunder dalam penelitian ini berupa berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2021 yang bersumber dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul serta melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh agar dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan objektif terkait kinerja anggaran pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2017-2021. Sesuai dengan pendekatan *value for money* yang memiliki 3 tingkatan yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengukuran Ekonomi

Mengukur dan mengetahui Tingkat ekonomi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan anggaran anggaran belanja. Rumus yang digunakan menurut Mahsun (2013:186) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria ekonomis adalah :

Tabel 1
Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi

Presentase (%)	Kriteria
>100	Ekonomis
85-100	Cukup Ekonomis
65-84	Kurang Ekonomis
<65	Tidak Ekonomis

Hasil Perhitungan Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017–2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Rasio Ekonomi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021

Sumber: Data Peneliti (2022), diolah

Pada tabel 2 rasio ekonomi tahun 2017 yaitu 92,65%. Kemudian, pada tahun 2018 rasio ekonomi naik menjadi 93,93% dan masih berada dalam kriteria cukup ekonomis. Hingga

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Ekonomi (%)	Kriteria
2017	4.175.809.475.825,00	4.507.020.679.434,00	92,65	Cukup Ekonomis
2018	4.415.586.584.477,67	4.701.140.309.467,00	93,93	Cukup Ekonomis
2019	4.758.379.563.095,30	5.222.406.123.824,55	91,11	Cukup Ekonomis
2020	5.290.121.484.382,14	5.821.414.084.033,00	90,87	Cukup Ekonomis
2021	5.508.767.906.132,69	6.880.672.335.906,00	80,06	Kurang Ekonomis
Rata-Rata			89,00	Cukup Ekonomis

pada tahun 2019 menurun ke angka 91,11% dan pada tahun 2020 kembali menurun 0,24% menjadi 90,87%. Walaupun terjadi penurunan pada tahun 2019 hingga 2020, rasio ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada pada diatas 85% sehingga masih tergolong cukup ekonomis. Namun, pada tahun 2021 rasio ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur turun menjadi 80,06% dan tergolong dalam kriteria kurang ekonomis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diketahui adapun faktor yang menyebabkan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada kategori cukup ekonomis atau realisasi belanjanya lebih kecil dari anggaran belanja yang telah ditargetkan antara lain yaitu adanya pekerjaan atau program yang belum selesai dikerjakan pada tahun anggaran berjalan sehingga belum bisa dibayar, ketersediaan dana yang tidak cukup karena realisasi pendapatan yang menurun, serta perubahan regulasi dalam keadaan luar biasa misalnya bencana alam atau pandemi COVID-19 yang membuat belanja yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Pengukuran Efisiensi

Mengukur dan mengetahui tingkat efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan. Rumus yang digunakan

menurut (Mahsun, 2013:186) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Efisiensi adalah :

Tabel 3
Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi

Presentase (%)	Kriteria
<90	Sangat Efisien
90-99	Efisien
100	Cukup Efisien
>100	Tidak Efisien

Sumber:(Mahmudi, 2015:111)

Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017–2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Rasio Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2017	4.175.809.475.825,00	4.700.213.492.509,51	88,84	Sangat Efisien
2018	4.415.586.584.477,67	4.781.089.962.593,22	92,36	Efisien
2019	4.758.379.563.095,30	5.354.092.405.679,30	88,87	Sangat Efisien
2020	5.290.121.484.382,14	5.419.936.156.637,49	97,60	Efisien
2021	5.508.767.906.132,69	5.312.446.872.608,51	103,70	Tidak Efisien
Rata-Rata			94,45	Efisien

Sumber: Data Peneliti (2022), diolah

Pada tabel 4 menunjukkan bahwa semakin kecil tingkat presentasi yang dihasilkan maka akan dianggap efisien. Rasio efisien tahun 2017 Rasio efisiensi untuk tahun 2017 berada pada angka 88,84% sehingga tergolong dalam kriteria sangat efisien, dan pada tahun 2018 rasio efisiensi mengalami kenaikan sebesar 3,52% yaitu mencapai angka 92,36% sehingga pada tahun 2018 rasio efisiensi tergolong dalam kriteria efisien. Pada tahun 2019 rasio efisiensi mengalami penurunan ke angka 88,87% sehingga tergolong kriteria efisien, akan tetapi rasio efisiensi di tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami kenaikan yaitu mencapai angka 97,60% dan 103,70% yang menyebabkan rasio efisiensi tahun 2020 berada pada kategori efisien dan tahun 2021 berada pada kategori tidak efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui faktor yang menyebabkan tingkat efisiensi berada pada kategori efisien yaitu karena optimalnya pengelolaan sumber daya pada sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disertai peningkatan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

Pengukuran Efektivitas

Mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diukur dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Rumus yang digunakan menurut Mahsun (2013:187) adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas adalah :

Table 5
Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas

Persentase (%)	Kriteria
≥ 100	Sangat Efektif
85-99	Efektif
65-84	Kurang Efektif
<65	Tidak Efektif

Sumber:(Mahmudi, 2015:111)

Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017–2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Rasio Tingkat Efektivitas Kinerja
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Periode 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2017	4.700.213.492.509,51	4.797.226.620.000,00	97,98	Efektif
2018	4.781.089.962.593,22	4.910.289.134.602,00	97,37	Efektif
2019	5.354.092.405.679,30	5.561.056.352.548,00	96,28	Efektif
2020	5.419.936.156.637,49	5.837.951.035.533,00	92,84	Efektif
2021	5.312.446.872.608,51	5.881.616.887.272,00	90,32	Efektif
Rata-Rata			94,74	Efektif

Pada tabel 6, Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 hingga 2021 tetap terjaga diatas 90%, walaupun mengalami tren penurunan. Rasio efektivitas terbesar berada pada tahun 2017 dengan tingkat efektivitas 97,98%. Sedangkan, tingkat rasio efektivitas terendah berada pada tahun 2021 dengan tingkat efektivitas sebesar 90,32%. Rasio efektivitas tahun 2020 merupakan rasio efektivitas yang mengalami penurunan paling signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diketahui adanya faktor yang mempengaruhi sehingga tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada kriteria efektif yaitu karena optimalnya pengelolaan sumber daya pada sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa Pemerintah Nusa Tenggara Timur akan terus bekerja lebih baik lagi dalam meningkatkan realisasi pendapatannya lewat koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang matang agar tahun berikutnya tidak mengalami penurunan presentase realisasi pendapatan terhadap target pendapatan

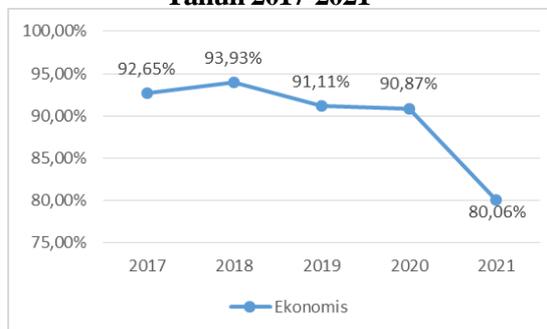
PEMBAHASAN

Rasio Ekonomi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021

Tingkat ekonomis kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja dari tahun 2017 sampai 2021. Hal penting yang perlu diketahui bahwa ekonomis merupakan penghematan anggaran untuk memperoleh input dengan tidak

melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Berikut disajikan grafik rasio ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1.2.

Gambar 1
Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017-2021



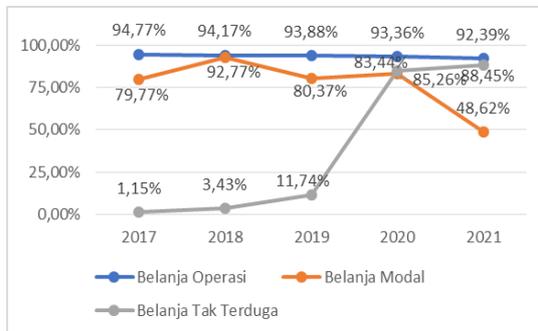
Sumber : Data peneliti (2023), diolah

Gambar 1 menunjukkan rasio ekonomi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2020 berada pada persentase diatas 90% dan tergolong cukup ekonomis. Pada tahun 2017, rasio ekonomi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 92,33% yang tergolong cukup ekonomis. Pada tahun 2018 rasio ekonomi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sebesar 1,28% menjadi 93,93% dan termasuk kategori cukup ekonomis. Tahun 2019 terjadi penurunan rasio ekonomi menjadi 91,11%. Walaupun terjadi penurunan, nilai tersebut masih mempertahankan pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam kategori cukup ekonomis berkaitan dengan pengelolaan anggaran belanja.

Pada tahun 2020, rasio ekonomi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mengalami penurunan sebesar 0,24% menjadi 90,87%. Hal ini berarti pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 masih dapat menunjukkan kinerja yang cukup ekonomis. Tahun 2021 kembali terjadi penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 10,81% menjadi 80,06%. Penurunan tersebut membawa kinerja pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 menjadi tergolong kurang ekonomis berkaitan pengelolaan belanja daerah. Pemerintah Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Laporan Realisasi Anggarannya

mengelompokkan belanja kedalam tiga jenis yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Tingkat ekonomis berdasarkan masing-masing jenis belanja telah disajikan gambar 2 berikut ini.

Gambar 2
Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Belanja



Berdasarkan Gambar 2, Belanja Operasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 cenderung berada pada tren penurunan meskipun nilai penurunannya masih tergolong kecil dan berada pada kategori cukup ekonomis. Belanja operasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk dalam belanja operasi adalah belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja tersebut merupakan belanja yang penting serta harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, rasio ekonomi Belanja Operasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga cenderung mengalami penurunan yang tidak signifikan mengingat pentingnya belanja operasi dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah. Kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah salah satunya yakni kurangnya pemahaman regulasi terkait pengadaan barang dan jasa yang terus mengalami perubahan sehingga realisasi belanja barang dan jasa juga mengalami penurunan.

Hal yang berbeda terjadi pada Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017, rasio ekonomi belanja modal berada pada nilai 79,77% dan tergolong kurang ekonomis. Selanjutnya, pada tahun 2018, rasio ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kenaikan yang

drastis hingga mencapai 92,77% dan termasuk cukup ekonomis. Kenaikan tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2019 kembali terjadi penurunan sebesar 12,4% menjadi 80,37%. Tahun 2020, rasio ekonomi naik ke angka 83,44% dan tahun 2021 kembali menurun menjadi 48,62% menyebabkan tidak ekonomisnya belanja modal pada tahun 2021 tersebut. Kendala dan permasalahan terkait belanja modal juga masih berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Menurut Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019, kurangnya personel yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah.

Rasio ekonomi belanja tak terduga Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 hingga 2019, belanja tak terduga Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki rasio ekonomi yang sangat rendah yakni 1,15% pada tahun 2017, 3,43% pada tahun 2018 dan 11,74% pada tahun 2019 dan termasuk kedalam kategori tidak ekonomis. Hal tersebut disebabkan oleh kecilnya realisasi belanja tak terduga dibandingkan dengan yang telah dianggarkan. Tahun 2020 realisasi belanja tak terduga meningkat hingga mencapai 85,26% dan berada pada kriteria cukup ekonomis. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan pemerintah untuk menggunakan anggaran belanja tak terduga tersebut. Kondisi pandemi COVID-19 yang berlanjut hingga tahun 2021, mengakibatkan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih harus menggunakan anggaran belanja tak terduga tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2021 rasio ekonomi belanja tak terduga meningkat menjadi 88,45% dan termasuk dalam kategori cukup ekonomis.

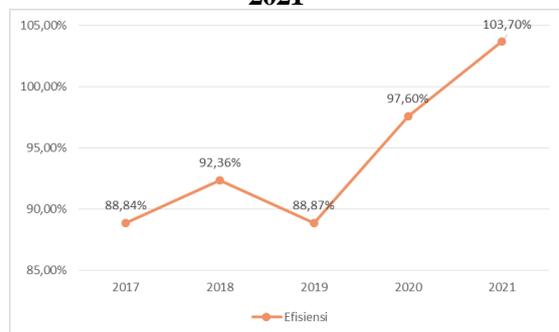
Rasio ekonomis untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 secara rata-rata menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada kriteria cukup ekonomis. Mahsun (2013:186) menjelaskan bahwa suatu kegiatan dapat dikatakan ekonomis apabila dapat mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu. Mahmudi (2015:110) juga menjelaskan bahwa belanja akan dinilai baik apabila realisasinya tidak melebihi target anggarannya karena anggaran belanja merupakan batas maksimal belanja yang boleh dilakukan.

Hasil penelitian saat ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan konsep ekonomis dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan atau melakukan penghematan anggaran belanja. Hubungan antara hasil penelitian ini dengan *agency theory* yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku agen diberikan wewenang untuk mengatur keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya sebagai prinsipal dan dari hasil penelitian saat ini diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penghematan terhadap anggaran belanja agar sisa lebih penggunaan anggaran dapat digunakan sebagai pembiayaan ditahun selanjutnya.

Rasio Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021

Tingkat efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan dari tahun 2017 sampai 2021. Hasil perhitungan pada tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi atau naik turun dan secara rerataan berada pada kriteria efisien dengan realisasi belanja lebih kecil dari realisasi pendapatan. Berikut disajikan grafik rasio efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021.

Gambar 3
Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021



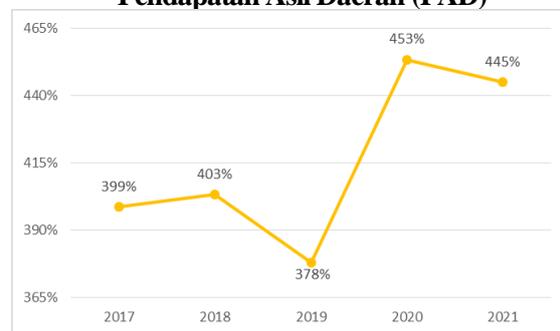
Sumber : Data peneliti (2022), diolah

Berdasarkan gambar 3, tahun 2017 rasio efisiensi pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 88,84% dan berada dalam kategori sangat efisien. Pada tahun 2018, rasio efisiensi tersebut meningkat ke

angka 92,36% dan masih tergolong efisien. Pada tahun 2019 rasio efisiensi pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali ke angka dibawah 90% yakni 88,87% dan termasuk kedalam kategori sangat efisien. Pada tahun 2020 rasio efisiensi tersebut kembali meningkat menjadi 97,60% yang artinya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tahun 2021, rasio efisiensi pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus meningkat hingga mencapai 103,70% dan termasuk kedalam kategori tidak efisien.

Rasio efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021, secara rata-rata, berada pada kriteria efisien. Mardiasmo (2018:165) menjelaskan bahwa suatu kegiatan dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mampu mengefisienkan pendapatan dan belanja daerah yang dibuktikan dengan realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanjanya. Untuk mengetahui rasio efisiensi belanja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pendapatan Asli Daerahnya, telah disajikan gambar 4 berikut

Gambar 4
Rasio Efisiensi Belanja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber : Data peneliti (2022), diolah

Berdasarkan gambar 4, rasio efisiensi belanja pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Total Realisasi Belanjanya sehingga termasuk kedalam kategori tidak efisien. Hal ini menunjukkan besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah provinsi

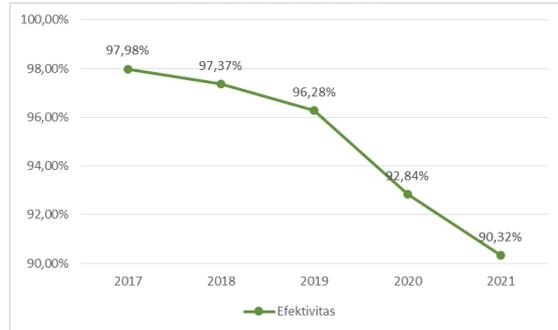
Nusa Tenggara Timur terhadap Pendapatan Transfer dari pusat. Rasio efisiensi terhadap PAD yang menunjukkan Tidak Efisien tersebut juga sebagai akibat dari belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah dan menyebabkan realisasi PAD menjadi sangat kecil jika dibandingkan belanja daerah. Padahal sebenarnya potensi itu ada dan cukup besar, hanya saja belum tergali, akibatnya dana untuk pembiayaan pembangunan menjadi lebih kecil dan harus bergantung dengan pendapatan transfer dari pusat. Ketergantungan ini juga mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang juga masih sangat rendah.

Hubungan antara hasil penelitian ini dengan *agency theory* yaitu dalam hak otonomi daerah, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai agen telah mampu membiayai belanja daerahnya untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat sebagai prinsipalnya, dengan pendapatan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat, walaupun rasio efisiensi terhadap PADnya masih tergolong rendah

Tingkat Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021

Tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan yang telah ditargetkan dari tahun 2017 sampai 2021. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1.6, tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi tidak begitu drastis. Walaupun terjadi penurunan, tetapi rasio efektivitas Pemerintah Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tetap berada pada kriteria efektif karena persentasenya masih berada pada kisaran 90% sampai 100%. Berikut disajikan grafik rasio efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 hingga 2021.

Gambar 5
Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021



Berdasarkan Gambar 1.5, rasio efektivitas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 adalah 97,98% dan masih tergolong dalam kategori efektif. Pada tahun 2018 rasio efektivitas tersebut mengalami penurunan menjadi 94,62% tetapi masih berada dalam kategori efektif. Penurunan rasio efektivitas terus terjadi hingga pada tahun 2019 mencapai angka 96,22% dan pada tahun 2020 menjadi 92,84%. Pada tahun 2021 rasio efektivitas tersebut mengalami penurunan lagi menjadi 90,32%. Rasio efektivitas tersebut masih berada pada kriteria efektif, walaupun terus mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah belum optimalnya pemanfaatan aset daerah pada beberapa SKPD yang dapat menimbulkan potensi penerimaan daerah. Menurut jenis pendapatannya, rasio efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disajikan pada grafik berikut ini.

Gambar 6
Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Pendapatan



Berdasarkan Gambar 6, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun

2017 sampai 2021 cenderung berada pada tren penurunan. Pada tahun 2017 dan 2018, rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur secara berturut-turut yakni 103,10% dan 100,44% dan berada pada kategori Sangat Efektif. Tahun 2019, rasio efektivitas tersebut menurun sebesar 6,9% ke angka 93,54%. Rasio efektivitas tersebut masih tergolong ke dalam kriteria efektif, walaupun terjadi penurunan. Tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi penurunan menjadi 79,59% dan 74,04% serta berada dalam kategori kurang efektif. Pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan yang cukup drastis pada rasio efektivitas PAD sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan rendahnya realisasi pendapatan khususnya dalam sektor pariwisata. Penurunan PAD yang terjadi terus menerus menyebabkan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan sumber pendapatan lainnya agar tercapai tingkat efektivitas yang ditargetkan.

Berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer pada pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 hingga 2021 cenderung stabil dengan kenaikan dan penurunan yang bahkan tidak lebih dari 2%. Secara rata-rata, rasio efektivitas pendapatan transfer tersebut masih berada di atas 90% dan termasuk kategori efektif. Rasio efektivitas terus terjaga karena peran dari pendapatan lain-lain yang sah yang terus meningkat pada saat pendapatan transfer cenderung konstan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung menurun. Pendapatan Daerah lain-lain yang sah tahun 2017 hingga 2021 berada pada tren meningkat dan mencapai persentasenya tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai 87,23% dan termasuk kriteria Efektif.

Tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 sampai 2021 secara rata-rata berada pada nilai 94,74% dan berada pada kriteria efektif. Mardiasmo (2018:166) menjelaskan bahwa pada dasarnya efektivitas berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dikategorikan efektif dalam merealisasikan pendapatan daerahnya karena hampir mendekati target pendapatan yang sudah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan anggaran dengan metode *Value For Money* yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran berdasarkan rasio ekonomi tergolong dalam kriteria cukup ekonomis karena dari hasil analisis perhitungan rata-rata rasio ekonomi selama tahun 5 tahun yaitu mencapai 89,00%, Rasio efisiensi tergolong dalam kriteria efisien dalam pengelolaan anggaran, dimana hasil analisis rata-rata perhitungan rasio efisiensi mencapai angka yaitu 94,45%, Pengelolaan anggaran pada APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rasio efektivitas tergolong dalam kriteria efektif, dimana hasil analisis rata-rata perhitungan rasio efektif mencapai angka yaitu 94,74%.

Saran

1. Saran bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menerapkan konsep *Value For Money* sebagai salah satu metode untuk menganalisis atau menilai kinerja, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu meningkatkan kinerja dari sisi ekonomis dengan cara mengurangi biaya yang dikeluarkan atau melakukan penghematan anggaran belanja agar realisasinya tidak melebihi target anggarannya, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan agar tetap mempertahankan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerjanya ditahun selanjutnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, diharapkan untuk menambahkan indikator lain terkait pengukuran kinerja dengan konsep *value for money* seperti *input*, *outcome*, dan *impact*. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengukur kinerja anggaran menggunakan rasio keuangan daerah sehingga hasil penelitian menunjukkan hasil yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Dessler, G. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resources* (2nd ed.). Prenhalindo.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta
- Khalimatus Syadiah, Susanti, W., & Rasyidi, A. (2016). Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya*, 9–20.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mashun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (4th ed.). BPFE.
- Midgley, J. (2005). *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Direktorat Perguruan Tinggi.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. (2007). *Balanced Scorecard : Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan* (5th ed.). Salemba Empat.
- Nainu, R., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2017). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Dalam “Program Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama” Dengan Menggunakan Metode Value for Money Pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1158–1166. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18619>. 2017
- Poerwandari, E. K. (1998). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*. Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI.
- Purwiyanti, D. (2017). ANALISIS KINERJA BERBASIS KONSEP VALUE FOR MONEY PADA KEGIATAN FISIK PEKERJAAN IRIGASI DONGGALA KODI (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *E Jurnal Katalogis*, 5(3), 190–200.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tunggal, A. W. (1995). *Kamus Akuntansi Manajemen Kontemporer* (1st ed.). Rineka Cipta.
- Wibowo. (2011). *Manajemen Kinerja* (3rd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Wuwungan, G. T., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2019). Penerapan Metode Value for Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 354–361. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26288>. 2019

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2020

Farida Ayu Lestari

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
faridaayulestrai12345@gmail.com

Fransina W. Ballo

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
fransinaballo@staf.undana.ac.id

Novi Theresia Kiak

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana
novi.kiak@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai pertumbuhan ekonomi inklusif dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif Kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data Primer dengan analisis metode PEGR (*Poverty-Equivalent Growth Rate*) untuk mengetahui nilai pertumbuhan inklusif dan menggunakan analisis paht untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan inklusif. Hasil analisis untuk menunjukkan nilai pertumbuhan inklusif dari 21 daerah kabupaten dan 1 kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi inklusif yang menghasilkan temuan bahwa secara rata-rata tahun 2016-2020 pertumbuhan inklusif mengalami kenaikan di setiap tahunnya sehingga di tahun 2020 mengalami pencapaian tertinggi dengan rata-rata 0.64 yang mengakibatkan 21 kabupaten dan 1 kota Nusa Tenggara Timur sudah mencapai keadaan inklusif. Selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif menggunakan analisis jalur / (*path analysis*) dari hasil uji mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung pertumbuhan ekonomi inklusif tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan faktor-faktor yang lain seperti tingkat kemiskinan dan gini rasio berpengaruh secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Terciptanya adanya pertumbuhan yang inklusif tidak serta hanya berpengaruh dari pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan, tingkat pengguran dan gini rasio sehingga untuk mempercepat adanya terwujudnya pertumbuhan inklusif di Nusa Tenggara Timur.

Kata kunci : *Pertumbuhan Inklusif, Metode Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Paht Analysis*

ABSTRACT

This study aims to determine the value of inclusive economic growth and what factors influence inclusive economic growth in East Nusa Tenggara districts/cities in 2016-2020. This study uses primary data with PEGR (Poverty Equivalent Growth Rate) method analysis to determine the value of inclusive growth and uses paht analysis to determine the factors that influence inclusive growth. The results of the analysis to show the value of inclusive growth from 21 districts and 1 city that experienced inclusive economic growth resulted in the finding that on average in 2016-2020 inclusive growth has increased every year so that in 2020 it experienced the highest achievement with an average of 0.64 which resulted in 21 districts and 1 city of East Nusa Tenggara having reached an inclusive state. Furthermore, to find out what factors affect inclusive economic growth using path analysis / (path analysis) from the test results to know the factors that directly and indirectly influence inclusive economic growth, the level of unemployment on inclusive

economic growth and other factors. such as the poverty rate and the gini ratio influence indirectly through economic growth as an intervening variable. The creation of inclusive growth does not only affect economic growth in the poverty rate, unemployment rate and gini ratio so as to accelerate the realization of inclusive growth in East Nusa Tenggara.

Keywords : Inclusive Growth, Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Method Path Analysi.

PENDAHULUAN

Semua negara baik negara maju maupun negara berkembang, tidak terlepas dari isu percepatan pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi dibutuhkan demi terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, terdapat perbedaan pandangan mengenai konsep pembangunan ekonomi, mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Todaro,Smith, 2009:10). Kebijakan-kebijakan pemerintah dilakukan untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik dengan memberikan beberapa program kegiatan, yang sehingga menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimana kebijakan hal itu menciptakan kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila adanya masyarakat yang mampu mengolah sumber daya dan memanfaatkannya dengan sangat baik digunakan untuk memproduksi barang dan jasa agar menciptakan mobilitas yang baik. Pertumbuhan ekonomi sendiri menunjukkan seberapa jauh aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan untuk masyarakat dalam periode tertentu (Sukirno, 2006:29). Pembangunan ekonomi sendiri harus memiliki tujuan dimana untuk menciptakan suatu perubahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pertumbuhan ekonomi inklusif sebuah proses memastikan semua kelompok masyarakat baik kalangan terpinggir dapat merasakan sepenuhnya proses pertumbuhan. Konsep ini bermaksud bahwa pemberian hak

yang sama terhadap masyarakat yang terpinggir di dalam proses pertumbuhan. (Rauniar, Kanbur, 2009:213). Pertumbuhan ekonomi inklusif menciptakan berbagai kesempatan-kesempatan ekonomi yang sama, terlibatnya banyak masyarakat dari semua kalangan agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam pertumbuhan ekonomi menciptakan sebuah ide-ide baru yang mampu merangsang perekonomian dan meningkatkan mobilitas masyarakatnya banyak negara-negara di dunia sudah merasakan hasil dari pertumbuhan ekonomi inklusif atau berkelanjutan.

Hasil-hasil yang dirasakan dari negara yang sudah merubah sistem perekonomian. Pertumbuhan ekonomi inklusif dilihat dari tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita meningkat, penurunan angka kemiskinan, lapangan usaha semakin bervariasi, dan menurunkan tingkat pengangguran. *The United Nation Development Programme (UNDP)* dalam Azwar (2016) pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga semua pihak memperoleh manfaat yang sama, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor growth*). Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang memberikan kesempatan bagi seluruh kalangan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian yang diikuti oleh tiga indikator yaitu menurunnya ketimpangan masyarakat dan kemiskinan, serta meningkatnya penyerapan tenaga kerja (Klasen, 2010:285).

Grafik 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022

Grafik 1 Perbedaan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada tahun 2016 – 2020. Tahun 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB 5.12%, dominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 28.89%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 12.67%, reparasi mobil dan sepeda motor 11.07%, sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga 76.33%. PDRB Indonesia mencapai 5.03%, yang di dominasi lapangan usaha informasi dan komunikasi 9.57%, dan lembaga non-profit sebesar 6.72%. Tahun 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB 5.16%, dominasi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum 13.59%, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit 6.86%, usaha pertanian, kehutanan, perikanan 28.72%. PDRB Indonesia mencapai 5.07% didominasi dari sisi produksi 1.70%, usaha pertanian, kehutanan, perikanan 21.60% dan kontribusi dari setiap Jawa 58.49%, Sumatera 21.66%, Kalimantan 8.20%.

Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB 5.13%, dominasi lapangan usaha perdagangan listrik dan gas 10.76%, pertanian, kehutanan, perikanan 28.40%, dan konsumsi rumah tangga 72%. PDRB Indonesia mencapai 5.18%, yang di dominasi lapangan usaha jasa dan lainnya 9.08%, pertanian, kehutanan, perikanan 21.41%, dan ekspor barang dan jasa 2.22%. Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB 5.24%, dominasi lapangan usaha industri 9.14%, konstruksi 8.18%, dan pembentukan modal tetap bruto 5.02 %.

PDRB Indonesia mencapai 5.02%, yang di dominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan 20.52%, dan komponen ekspor barang dan jasa 2.55%. Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PDRB -0.83%, didominasi lapangan usaha jasa keuangan 13.15%, dari sisi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 1.06%, dan pertanian, kehutanan, perikanan 28.51%. PDRB Indonesia mencapai -2.07%, yang di dominasi lapangan usaha perikanan 20.15%, dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintahan 27.15%.

PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur di bandingkan dengan PDRB Indonesia selama periode lima tahun terakhir dari tahun 2016 - 2020 pada Grafik 1 menunjukkan bahwa posisi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Indonesia hal tersebut mengisyaratkan bahwa perekonomian di Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan lebih baik daripada nasional dikarenakan adanya perkembangan dari beberapa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan beberapa sektor usaha yang berkembang seperti pengembangan listrik, gas dan jasa yang sudah terjadi pengembangan dan di dukung keadaan perekonomian membaik dan mengalami peningkatan adapun hal-hal yang mengakibatkan adanya penurunan setiap tahunnya menciptakan reaksi terhadap beberapa pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dengan diiringi oleh kesejahteraan masyarakatnya meliputi PDRB, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan gini rasio.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang dalam ketidakmampuan ekonomi, materi, dan fisik untuk mencukupi beberapa kebutuhan dasar. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Ukuran kemiskinan dilihat dari seberapa besar garis kemiskinan dilihat dari garis kemiskinan makan dan non makanan. Garis kemiskinan makan adalah kebutuhan yang dikeluarkan untuk makan dan minum, garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan yang dikeluarkan bukan untuk makan dan minum dilihat dari kebutuhan pendidikan, kesehatan perumahan, sandang dan kebutuhan lainnya.

Grafik 2
Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022

Grafik 2 Perbedaan tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada tahun 2016 – 2020. Tahun 2016 tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 22.19%, peran komoditi makanan dalam garis kemiskinan 79.20%, periode september garis kemiskinan naik sebesar 1.26%, yaitu dari Rp 322,947 per kapita per bulan. Tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 10.70%, dipengaruhi oleh garis kemiskinan makanan 73.19%, jumlah penduduk miskin di perkotaan 7.73%, dan pedesaan 13.96%. Tahun 2017 tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 21.85% peran komoditi makanan dalam garis kemiskinan 78.83%. Tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 10.12%, dipengaruhi oleh garis kemiskinan makanan 73.35%, jumlah penduduk miskin di perkotaan 7.26%, dan pedesaan 13.47%.

Tahun 2018 Tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 21.35%, peran komoditi makanan dalam garis kemiskinan 78.59%, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9.66%, dipengaruhi oleh garis kemiskinan makanan 73.54%, garis kemiskinan bukan makanan 26.46%. Tahun 2019 tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 21.09%, garis kemiskinan makanan 78.17%, dan garis kemiskinan bukan makanan 21.83%. Tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9.22%, dipengaruhi garis kemiskinan makanan 73.54%, garis kemiskinan bukan makanan

26.25%. Tahun 2020 tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 20.90%, indeks kedalaman kemiskinan 3.96%. Tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 10.19%, dipengaruhi garis kemiskinan makanan 73.87%, garis kemiskinan bukan makanan 26.13%.

Tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur di bandingkan dengan nasional selama periode lima tahun terakhir dari tahun 2016 - 2020 pada Grafik 2 menggambarkan tingkat kemiskinan Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan dengan nasional mengisyaratkan bahwa tingkat kemiskinan sangat tinggi diakibatkan kecilnya pendapatan per kapita rumah tangga, adapun beberapa indikator untuk mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif bisa dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (Sukirno, 2016). Pengangguran adalah masalah yang sangat serius yang mengakibatkan adanya pengaruh terhadap perekonomian baik itu individu maupun masyarakat, tingginya tingkat jumlah pengangguran mengakibatkan masyarakat tidak bisa memaksimalkan tingkat kesejahteraan.

Grafik 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022

Grafik 3 Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia pada tahun 2016 – 2020, Tahun 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Tingkat pengangguran Terbuka 3.25%, dikarenakan sektor pertanian 53.32%, jasa 16,42%, perdagangan 10.19%, dan sektor industri

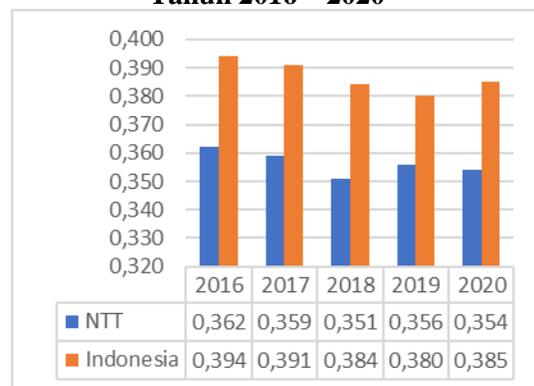
7.35%. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 5.61%, dikarenakan adanya kenaikan tenaga kerja di sector jasa kemasyarakatan 8.47%, perdagangan 3.93%, transportasi, pergudangan dan komunikasi 9.78% kenaikan. Tahun 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat pengangguran terbuka 3.27% dikarenakan pekerja dari sektor pertanian 54.81%, jasa 14.60%, perdagangan 10.23%, dan sektor industri 8.85%. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 5.33%, tingkat pengangguran untuk SMK 11.41%, kategori setengah menggagur 7.55%, dan pekerja paruh waktu 20.40%.

Tahun 2018 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat pengangguran terbuka 3.01%, dikarenakan para pekerja dari sektor pertanian 54.73%, perdagangan 9.64%, dan sektor industri 8.96%. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 5.30%, tingkat pengangguran untuk SMK 11.24%, kategori setengah menggagur 6.62%, dan pekerja paruh waktu 22.07%. Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat pengangguran terbuka 3.25%, dikarenakan para pekerja dari sektor pertanian 48.70%, perdagangan 10.97%, dan sektor industri 10.20%, tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 5.23%, pekerjaan formal seperti buruh, karyawan, pegawai 44.28%, dan kegiatan informal 55.72%. Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tingkat pengangguran terbuka 4.28%, dikarenakan para pekerja dari sektor pertanian 2.98%, konstruksi 0.88%, dan sektor industry 0.65%, tingkat pengangguran terbuka Indonesia mencapai 7.07%, sektor pertanian 2.23%, sektor industri 1.30%.

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur di bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Nasional selama periode lima tahun terakhir dari tahun 2016 - 2020 pada Grafik 1.3 kondisi tingkat pengangguran terbukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur rendah dibanding dengan nasional dikarenakan banyaknya lapangan pekerjaan dari beberapa sektor seperti pertanian, industry dan perdagangan sehingga membuat masyarakat bisa melakukan kegiatan dan mendapatkan pendapatan sehari-hari pengangguran terbuka di Nusa Tenggara Timur yang mengalami peningkatan yang

cukup di tahun 2017 tetapi di tahun-tahun selanjutnya mengalami stagnan. Bahkan peningkatan tersebut, membuat kondisi ketimpangan di Nusa Tenggara Timur menjadi lebih buruk diduga peningkatan ketimpangan tersebut mengakibatkan nilai tingkat ketimpangan atau gini rasio setiap kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur merupakan dampak dari melemahnya perekonomian secara yang terjadi pada tahun 2016 yang berujung adanya kesenjangan.

Grafik 4
Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia
Tahun 2016 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022

Grafik 4 perbedaan gini rasio Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016 – 2020. Tahun 2016 gini rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur 0.362% tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah, Gini rasio Indonesia mencapai 0.394%, dimana kondisi pengeluaran sebesar 17.02%, walaupun pengeluaran tersebut dikatan ketimpangan rendah, di kota tercatat pengeluaran 15.91%, dikatakan ketimpangan sedang dan di desa 20.40% yang berarti masuk dalam kategori rendah. Tahun 2017 gini rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur 0.359%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah. Gini rasio Indonesia mencapai 0.391%, dimana kondisi pengeluaran sebesar 17.22%, walaupun pengeluaran tersebut dikatakan ketimpangan rendah, di kota tercatat pengeluaran 16.33%, dikatakan ketimpangan sedang dan di desa 20.25%, yang berarti masuk dalam kategori rendah. Tahun 2018

gini rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur 0.351%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah.

Gini rasio Indonesia mencapai 0.384%, mana kondisi pengeluaran sebesar 17.29% walaupun pengeluaran tersebut dikatakan ketimpangan rendah. Di kota tercatat pengeluaran 16.47% dikatakan ketimpangan sedang dan di desa 20.15% yang berarti masuk dalam kategori rendah. Tahun 2019 gini rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur, 0.356%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah, Gini rasio Indonesia mencapai 0.380%, mana kondisi pengeluaran sebesar 17.71%, walaupun pengeluaran tersebut dikatakan ketimpangan rendah, di kota tercatat pengeluaran 16.90% dikatakan ketimpangan sedang dan di desa 20.66% yang berarti masuk dalam kategori rendah. Tahun 2020 gini rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur 0.354%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah. Gini rasio Indonesia mencapai 0.385%, mana kondisi pengeluaran sebesar 17.71%, walaupun pengeluaran tersebut dikatakan ketimpangan rendah, di kota tercatat pengeluaran 16.90%, dikatakan ketimpangan sedang dan di desa 20.89% yang berarti masuk dalam kategori rendah. Gini rasio atau ketimpangan pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di bandingkan dengan Tingkat gini rasio Nasional selama periode lima tahun terakhir dari tahun 2016 - 2020 pada Grafik 4 kondisi gini rasio di Provinsi Nusa Tenggara Timur rendah dibanding dengan nasional dikarenakan ketimpangan pendapatan setiap daerah berbeda-beda dan setiap daerah juga menerima penerimaan yang berbeda-beda banyaknya lapangan pekerjaan dari beberapa sektor seperti pertanian, industri dan perdagangan dan lain-lain perbandingan penerimaan di setiap daerah

Mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan atau gini rasio di Nusa Tenggara Timur tingkat ketimpangan tidak terlalu tinggi masih dikategori sedang di karena ketimpangan antar tiap kabupaten dan kota tidak jauh beda, tingkat gini rasio juga setiap tahunnya mengalami penurunan walaupun persekian persen. Maka dari itu adapun beberapa indikator yang bisa mempengaruhi bahwa adanya pertumbuhan ekonomi inklusif

yang telah di jelaskan di atas maka meskipun pertumbuhan inklusif bukanlah isu yang baru, namun pembahasan mengenai pertumbuhan inklusif masih menjadi pembahasan yang menarik. Saat ini, berbagai indikator yang mencirikan pertumbuhan inklusif masih terus dikembangkan, termasuk bagaimana metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan inklusif berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ‘‘Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020’’

KAJIAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adanya suatu kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan adanya permintaan pasar yang tinggi, kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada Sadono Sukirno (2008:9). pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dapat dilakukan dari tiga sudut pandang dari Badan Pusat Statistik penetapan Gross Domestic Product (GDP) yaitu :

1. Sudut pandang produksi, GDP merupakan jumlah nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dibagi menjadi sembilan kelompok usaha, yaitu: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industry pengolahan sektor listrik, gas dan air, sektor bangunan,

- sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor angkutan.
2. dan komunikasi; sektor lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Dari sudut pandang pendapatan, GDP merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu.
 3. Sudut pandang pengeluaran, GDP merupakan jumlah besaran nilai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, pengeluaran rumah tangga lembaga swasta yang tidak mencari untung dan pengeluaran pemerintah sebagai konsumen pengeluaran untuk pembentukan modal tetap serta perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat., disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan suatu proses yang menjamin kesetaraan terhadap peluang ekonomi bagi semua segmen sosial tanpa melihat keadaan masing-masing individu sehingga adanya pemerataan di setiap segmen masyarakat untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Strategi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dengan berbagai cara antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan, peningkatan jumlah tenaga kerja yang produktif, penguatan kapasitas produks, menghilangkan ketimpangan dan menjamin kesetaraan.

Inklusif diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang difokuskan untuk penciptaan peluang ekonomi dan dapat diakses semua orang (Ali, Zhuang 2007). Pendekatan

pertumbuhan ekonomi inklusif mengambil perpektif jangka panjang sehingga memiliki sifat berkelanjutan serta menghilangkan kesenjangan antara yang miskin dan kaya pertumbuhan ekonomi inklusif menginginkan setiap individu dapat berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat dan akan terus ada apabila selalu terjadi kesenjangan sosial di masyarakat Nurwati (2008). Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan katalain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak, dan juga adaapun penjelasan yang menyebutkan bahwa kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah, untuk memulihkan kemiskinan perlu menciptakan kesempatan-kesempatan baru untuk

menciptakan kesehatan fiskal untuk meredam gejala sehingga masyarakat kelompok miskin dapat terlindungi.

Jenis-jenis Kemiskinan Penduduk Miskin

Kemiskinan di bagi Kemiskinan Nur Arianto al Arif (2010). Kemiskinan di bagi menjadi tiga jenis yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang di ukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya, ketidak sempurnaan pasar keterbelakangan sumber daya alam, produktivitas rendah pendapatan rendah tabungan rendah investasi rendah kekurangan modal.
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan pendapatan perkapita disetiap masyarakat dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya apakah alasan dari ketidak merataan pendapatan perkapita dan penyebab mengapa pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar fakto-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya ketimpangan pendapatan.
- c. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut memungkinkan golongan masyarakat tidak ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan di sebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama Kemiskinan di sebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang Mudrat Kuncoro (2016:120). yaitu :

- a. Keterbatasan sumber daya modal keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dapat di artikan kualitas sumber daya manusia misalkan

keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.

- b. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk di jangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju, yang kedua yaitu kemiskinan yang di sebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah.

Pengangguran

Tiap negara dapat memberikan definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran Nanga (2005:249). Mendefinisikan pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Dalam sensus penduduk 2001 mendefinisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan atau biasanya pengangguran juga bisa diartikan bahwa ketidakmampuan seseorang untuk mencari pekerjaan karena terkendala suatu hal.

Mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan Alghofari, Farid (2010:28) :

- a. Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*) Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan presentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.
- b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)
- c. Bekerja penuh (*employed*) adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
- d. Setengah menganggur (*underemployed*) adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya dalam seminggu waktu seminggu kurang dari 35 jam.

Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran Sadono dan Sukirno (2013:329). Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok

- a. Pengangguran Normal atau Friksional
Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai pengangguran, mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.
- b. Pengangguran Siklikal
Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi, lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang, akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan

- mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal
- c. Pengangguran Struktural
Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.
 - d. Pengangguran Teknologi
Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia, racun ilalang dan rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan

mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi

Gini Rasio

Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia indikator Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (International NGO Forum on Indonesia Development, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika indeks gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Badan Pusat Statistik, Indeks Gini didasarkan pada Kurva Lorenz, yakni sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu indikator tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Indeks gini membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung nilai rasio gini atau indeks gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (F_{Ci} + F_{Ci-1})$$

Keterangan:

GR = Koefisien Gini

f_{pi} = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{Ci} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-

F_{Ci-1} = frekuensi kumulatif dari total -1 pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i - 1).

Walaupun dalam kenyataannya masih terdapat banyak pertimbangan untuk menyatakan pemerataan tingkat pendapatan masyarakat, Indeks Gini menjadi salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin),

prinsip independensi skala (tidak bergantung pada perekonomian suatu negara), prinsip independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk), serta prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan). Berdasarkan penjabaran tersebut, maka indeks gini valid untuk digunakan sebagai alat ukur ketimpangan yang umum digunakan. ketimpangan pendapatan akan menghambat pertumbuhan. Hal ini karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi pendapatan yang mahal. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan sudah diteliti sebelumnya.

Namun belum jelas apakah faktor-faktor yang benar-benar berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan sebab sampai sekarang ketidakmerataan pendapatan masih terus terjadi di berbagai kabupaten/kota di Indonesia sehingga menciptakan berbagai golongan ekonomi masyarakat jadi pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan perubahan suatu masyarakat atau menyesuaikan sistem sosial secara keseluruhan, untuk mencapai kemakmuran masyarakat diperlukan berbagai usaha yang konsisten bagi kemakmuran bersama dengan menciptakan berbagai program-program untuk semua kalangan masyarakat seluruh masyarakat Indonesia walaupun pendapatan masyarakat tidak sama akan tetapi perbedaan ketimpangan pendapatan tidak terlalu berbeda jauh karena tidak mungkin provinsi Nusa Tenggara Timur dan provinsi Nusa Tenggara Timur bisa memiliki ketimpangan yang sama karena indikator yang di hasilkan berbeda-beda, maka dari itu ketimpangan pendapatan hanya bisa diminimalisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode PEGR dan *Analysis Paht* untuk mengetahui nilai pertumbuhan inklusif dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 21 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut cukup beralasan mengingat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan yang sangat signifikan di akibatkan wabah covid-19. Tingkat ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, demikian pula dengan jumlah pengangguran Sedangkan dalam hal kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis pariwisata, dan industrialisasi, misi tersebut bertujuan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, waktu yang dipilih adalah mulai dari tahun 2016 hingga 2020. Dipilihnya tahun 2016 - 2020 dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana keadaan. pertumbuhan ekonomi inklusif di Nusa Tenggara Timur dan faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi besar tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif pada 22 kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur.

Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:80). Adapun kriteria yang sampel yang digunakan dalam pengukuran inklusivitas pertumbuhan di Nusa Tenggara Timur merujuk pada metode yang digunakan metode PEGR (*poverty equivalent growth rate*) yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Klasen (2010:285) Dan untuk menghitung faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan inklusif menggunakan *analysis path*, beberapa indikator yang tersedia datanya sebagai acuan data tersebut meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan gini ratio di Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan merupakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (*measurable*) atau dihitung secara langsung sebagai variable angka atau bilangan. Data yang digunakan adalah tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan gini ratio di Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui media perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah berupa data tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan gini ratio di Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020. yang telah disediakan atau yang telah dipublikasikan oleh lembaga terkait untuk mendukung kelengkapan dalam penelitian maupun dalam analisis data.

Teknik Analisis Data

Menjawab permasalahan-permasalahan dalam rumusan masalah maka digunakan teknik analisis data sebagai berikut: Seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif pada 22 kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur. Mengukur besar tingkat pertumbuhan inklusif dilakukan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengukuran Pertumbuhan Inklusif Metode PEGR Pengukuran pertumbuhan inklusif metode PEGR salah satu metode dalam mengukur pertumbuhan inklusif, dikembangkan oleh Klasen (2010). Metode tersebut diadaptasi dari metode penelitian pro-poor growth yang pernah dilakukan (Kakwani dan Son 2008:67). Yaitu konsep *Poverty-Equivalent Growth Rate* (PEGR) dengan mengadopsi konsep perhitungan dalam PEGR, pertumbuhan inklusif dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumus Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

$$IG_{ij} = \left(\frac{E_{ij}}{E_i} \right) E_j$$

Dimana:

IG_{ij} = Koefisien pertumbuhan inklusif

E_{ij} = Pertumbuhan kelompok i dan kaitannya dengan

indikator j
 E_j = Pertumbuhan indikator j
 E_j Dalam hal ini i mengacu pada kelompok yang kurang beruntung tertentu dan j mengacu pada indikator yang bersangkutan

E_{in} = Elastisitas ketimpangan terhadap pendapatan rata-rata

IG_{em} = Koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan pengangguran

E_{emg} = Elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi

E_{em} = Elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pendapatan rata-rata

Mengacu pada konsep pertumbuhan inklusif yang terdiri dari 3 indikator yaitu PDRB, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan maka ketiga indikator tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- a. Indeks inklusif untuk menurunkan Kemiskinan

$$IG_p = \left(\frac{E_{pg}}{E_p}\right)G_g$$

- a. Indeks inklusif untuk menurunkan Pengangguran

$$IG_{in} = \left(\frac{E_{in.g}}{E_{in}}\right)G_g$$

- b. Indeks inklusif untuk menurunkan Ketimpangan Pendapatan

$$IG_{em} = \left(\frac{E_{em.g}}{E_{em}}\right)G_g$$

Dimana:

IG_p = Koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan

E_{pg} = Elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi

E_p = Elastisitas kemiskinan terhadap pendapatan rata-rata

G_g = Pertumbuhan ekonomi

IG_{in} = Koefisien pertumbuhan inklusif dalam menurunkan ketimpangan

E_{jpg} = Elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan lokasi penelitian Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016-2020. Populasi meliputi 22 kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Perhitungan indeks pertumbuhan inklusif dilakukan dengan menggunakan metode PEGR seperti yang dilakukan oleh (Klasen, 2010). Adapun untuk menghitung indeks inklusif adalah sebagai berikut :

$$IG = \frac{IG_p + IG_{em} + IG_{in}}{3}$$

Dimana:

IG = Indeks Pertumbuhan Inklusif

IG_p = Indeks pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan

IG_p = Indeks pertumbuhan inklusif dalam menurunkan pengangguran

IG_p = Indeks pertumbuhan inklusif dalam menurunkan gini rasio

Setelah mengetahui nilai setiap pertumbuhan dan apabila nilai Pertumbuhan dapat dikatakan inklusif, apabila nilai dari $IG \geq \hat{g}$.

- b. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi besar tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif pada 22 kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur. Analisis dilakukan menggunakan analisis jalur (*analysis path*).

1. Analisis Jalur (*analysis path*)

Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linier ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel intervening, analisis jalur adalah penggunaan analisis berganda untuk menafsirkan hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan berdasarkan teori, untuk koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel (Muhidin,2009:56) . Teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel intervening yang dapat memediasi pengaruh dari variabel independen dan dependennya. dengan *analysis path* ini kita dapat mengetahui nilai signifikansi dari variabel intervening. Modelnya digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah dimana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedangkan yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga penghitungan uji keselarasan statistik. Diagram jalur dalam penelitian terdiri atas satu persamaan substruktur dapat dilihat variabel X1, X2, X3 yang mempengaruhi antar variabel bebas, selanjutnya X1, X2, X3 terhadap variabel Z tanpa melalui variabel Y adalah pengaruh langsung *direct effect* sedangkan pengaruh variabel X terhadap Z melalui variabel Y sebagai pengaruh tidak langsung *indirect effect*, variabel Y disini disebut variabel intervening yang memediasi variabel X dan Z, berdasarkan nilai yang sudah didapat maka variabel mana yang memberikan pengaruh.

Persamaan Analisis Jalur :

$$Y = x_1x_1 + x_2x_2 + x_3x_3 + e_1$$

$$Z = x_1x_1 + x_2x_2 + x_3x_3 + y + e_1$$

Dimana :

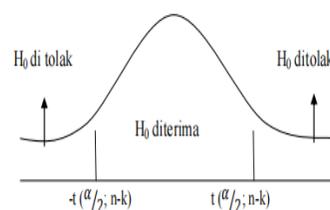
- Y = Pertumbuhan ekonomi
- Z = pertumbuhan ekonomi inklusif
- X₁ = Tingkat kemiskinan
- X₂ = Tingkat pengangguran terbuka
- X₃ = Gini rasio

2. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t (uji parsial) merupakan pengujian hipotesis secara parsial untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi secara individu berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain konstan (Sugiyono 2018:223). Jika koefisien regresi signifikansi menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent (*explanatory*) secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk menguji koefisien hipotesis $H_0 = 0$

Gambar 1
Kurva uji t

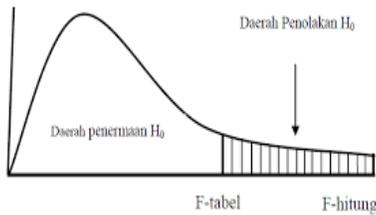


b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F (Uji Simultan) Uji F dikenal dengan Uji serentak atau uji Model/Uji Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji

apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.

Gambar 2
Kurva uji F



c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya berfungsi untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sujarweni dan V. Wiranta 2015:164). Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol atau satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

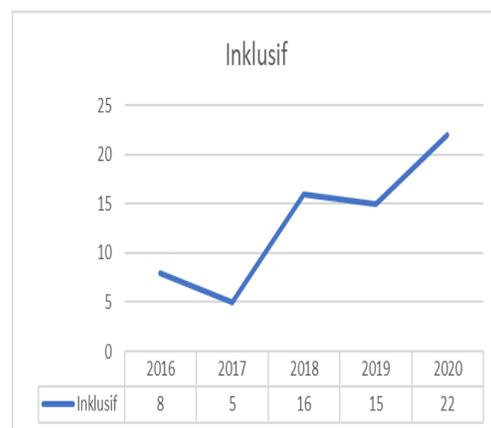
Hasil Uji Metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif pada 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2020

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dinyatakan inklusif, apabila indeks pertumbuhan inklusifnya lebih besar atau sama dengan pertumbuhan ekonominya. metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan inklusif yang dikembangkan oleh Klasen (2010). Metode yang diadaptasi dari metode penelitian *pro-poor growth* yang pernah dilakukan oleh Kakwani dan Son

(2008) yaitu konsep *Poverty-Equivalent Growth Rate* (PEGR). Mengacu pada konsep pertumbuhan

Bahwa rata-rata pertumbuhan inklusif trend stagnan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.64%. Indeks pertumbuhan inklusif mengalami peningkatan di waktu yang bersamaan pula pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan. Belum di katakan Provinsi Nusa Tenggara Timur inklusif dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur dilihat dari rata-rata yang disebabkan masih ada beberapa kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur belum bisa mencapai pertumbuhan inklusif. Setelah melakukan perhitungan dari 110 sampel yang dilakukan 21 kabupaten dan 1 kota selama 5 tahun, selama melakukan observasi 4% atau 46 sampel yang mencapai pertumbuhan inklusif, dan 96% atau 64 sampel masih belum inklusif, selanjutnya dari jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif dari 2016 sampai 2020 gambar 4.3 di ketahui bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan bahwa walaupun tahun 2017 mengalami penurunan walaupun tidak begitu jauh.

Grafik 6
Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Berhasil Mencapai Pertumbuhan Inklusif Tahun 2016 – 2020



Sumber : Data diolah oleh penulis : 2022

Grafik 6 tahun 2016 daerah yang berhasil mencapai pertumbuhan inklusif antara lain Kupang, Alor, Lembata, Flores Timur, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Sabu Raijua.

Tahun 2017 Belu Ende Ngada Manggarai Manggarai Timur. Tahun 2018 Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Utara, Alor, Lembata, Sikka, Manggarai, Rote Ndao, Malaka, Kota Kupang, Manggarai Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya, Ngada, Ende, Belu. Tahun 2019 Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Sikka, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, Malaka. Tahun 2020 sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijun, Malaka, Kota Kupang.

Pembahasan Penelitian

Metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif pada 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2020

Pertumbuhan ekonomi inklusif di setiap kabupaten/kota belum merata karena di setiap kabupaten/kota memiliki nilai yang berbeda dari segi tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang mengakibatkan nilai pertumbuhan inklusif berbeda, daerah-daerah yang mencapai kondisi pertumbuhan ekonomi inklusif berarti memiliki pertumbuhan yang baik sebaliknya daerah-daerah yang belum mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif memiliki kondisi yang belum baik, pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sarana untuk meraih kesejahteraan melainkan lebih dari itu, pertumbuhan yang tinggi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu juga ditentukan oleh mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan untuk menekan kesenjangan antar golongan.

Pertumbuhan inklusif tidak hanya menciptakan peluang ekonomi yang baru kan tetapi juga memastikan adanya kesamaan antara semua lapisan masyarakat terkhusus masyarakat miskin tidak peduli latar belakang dan perbedaan-perbedaannya (Prasetyantoko :

2012). disisi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak semua masyarakat memperoleh manfaat yang sama jika dilihat pada kuadran pertumbuhan ekonomi inklusif tahun 2016 sampai 2020 Nusa Tenggara Timur di 21 kabupaten/kota pertumbuhan ekonomi inklusif meningkat di setiap tahunnya faktor penyebabnya menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan inklusif di 21 kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 seluruh kabupaten/kota di Kuadran IV menggambarkan penurunan kemiskinan, pengangguran dan gini rasio seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif, Kuadran IV kemungkinan, apabila nilai indeksnya lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi ($IG > Gg$). Artinya, manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih banyak diterima oleh masyarakat yang miskin (*pro poor*). Hasil penelitian ini sama hanya dengan penelitian yang dilakukan Dara A.N Prabandi (2018) menghitung dan menganalisis inklusivitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan metode *Poverty Equivalent Growth Rate* (PEGR) oleh Klasen (2010).

Pertumbuhan ekonomi inklusif pada masing-masing daerah di provinsi nusa tenggara timur mengalami arah yang baik karena dari jenjang waktu 2016 sampai 2020 pertumbuhan inklusif mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan menunjukkan nilai yang turun mengakibatkan sebagian banyak kabupaten/kota yang mencapai pertumbuhan inklusif

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Inklusif di Nusa Tenggara Timur

Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif terbagi menjadi dua, yaitu faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pertumbuhan ekonomi yang menjadi variabel intervening

1. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi bahwa memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur hal ini disebabkan nilai signifikan lebih besar $0.366 >$ dari pada taraf signifikan 0.05 yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan rendah belum tentu menciptakan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan Wulan Retno Hapsari (2019) dimana mengenai permasalahan tentang kemiskinan turun tidak dapat serta menyebabkan kualitas pertumbuhan langsung bersifat inklusif perlu adanya strategi dan komponen penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan

2. Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

Pertumbuhan ekonomi memediasi hubungan antara tingkat kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur. Variabel pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tingkat kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif tidak langsung, di lihat dari nilai pengaruh tidak langsung tingkat kemiskinan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi inklusif melalui variabel pertumbuhan ekonomi nilainya lebih besar 0.0029 daripada nilai. Pengaruh langsung tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif -0.001 . Hal ini menunjukkan bahwa walaupun keadaan tingkat kemiskinan di setiap tahunnya menurun belum bisa mempengaruhi secara langsung pertumbuhan inklusif.

3. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran

terbuka memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur hal ini disebabkan nilai signifikan lebih besar $0.333 >$ dari pada taraf signifikan 0.05 yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka menciptakan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan Seran (2017) . Dimana adanya tingkat pengangguran terbuka berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yang mengisyartkan bahwa tidak ada pengaruh variabel lain sehingga apa bila terjadi kenaikan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka disetiap kabupaten/kota menimbulkan reaksi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif.

4. Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

Pertumbuhan ekonomi tidak memediasi hubungan antara tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur. Variabel pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka tidak mempengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi inklusif, di lihat dari nilai pengaruh tidak langsung tingkat kemiskinan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi inklusif melalui variabel pertumbuhan ekonomi nilainya lebih kecil -0.0189 daripada nilai pengaruh langsung tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif 0.007 . Disisi lain apabila tingginya dan rendahnya tingkat pengangguran terjadi mengakibatkan terjadinya pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

5. Pengaruh gini rasio terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa gini rasio memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur hal ini disebabkan nilai signifikan lebih

besar $0.211 >$ dari pada taraf signifikan 0.05 yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa gini rasio rendah belum tentu menciptakan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan McKinley (2010) dimana mengenai permasalahan tentang gini rasio turun tidak dapat serta menyebabkan kualitas pertumbuhan langsung bersifat inklusif perlu adanya strategi dan komponen penting lainnya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan

6. Pengaruh gini rasio terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening

Pertumbuhan ekonomi tidak memediasi hubungan antara gini rasio mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur. Variabel pertumbuhan ekonomi mengakibatkan gini rasio mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif tidak langsung, di lihat dari nilai pengaruh tidak langsung gini rasio terhadap variabel pertumbuhan ekonomi inklusif melalui variabel pertumbuhan ekonomi nilainya lebih kecil -0.02228 daripada nilai pengaruh langsung tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif -0.027 . Hal ini menunjukkan bahwa walaupun keadaan gini rasio di setiap tahunnya menurun mempengaruhi secara langsung pertumbuhan inklusif.

7. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Nusa Tenggara Timur hal ini disebabkan nilai signifikan lebih kecil $0.000 <$ dari pada taraf signifikan 0.05 yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan Ali dan Zuang (2007) dimana adanya pertumbuhan

ekonomi berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif yang mengisyartkan bahwa adanya pertumbuhan yang berkelanjutan dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang sama.

Setelah mengetahui hasil dan pembahasan di atas, selanjutnya akan melakukan implikasi hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Implikasi hasil penelitian diperlukan untuk melihat bagaimanakah upaya mempercepat inklusif pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.

- a. Tingkat kemiskinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif H^1 dikarenakan ada faktor lain yaitu pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif sehingga H^4 diterima
- b. Tingkat pengangguran terbuka diketahui bahwa berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif tidak ada faktor luar yang mempengaruhi sehingga H^2 diterima dan faktor lain yang mempengaruhi secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan inklusif H^5 di tolak
- c. Gini rasio diketahui bahwa tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif tidak ada faktor luar yang mempengaruhi sehingga H^3 ditolak dan faktor lain yang mempengaruhi secara tidak langsung tidak mempengaruhi melalui pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan inklusif H^6 di tolak
- d. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dan tidak ada faktor luar yang mempengaruhi sehingga H^7 diterima

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016-2020 kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi inklusif di Nusa Tenggara Timur tahun 2016–2020 di 21

Kabupaten dan 1 kota memiliki tren yang meningkat bahkan di tahun 2020 seluruh kabupaten/kota mengalami pertumbuhan ekonomi inklusif dikarenakan nilai pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari pada nilai pertumbuhan ekonomi inklusif yang mengartikan bahwa seluruh masyarakat merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang di dukung dengan menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan setiap daerah, walaupun di tahun 2020 tingkat pengangguran meningkat itu pun tidak terlalu berdampak secara menyeluruh dikarenakan masih banyak faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif.

2. Faktor-faktor yang memengaruhinya terciptanya adanya pertumbuhan yang inklusif di Nusa Tenggara Timur tidak serta hanya berpengaruh secara langsung dari tingkat pengangguran melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan inklusif seperti tingkat kemiskinan, gini rasio dan faktor-faktor luar seperti program-program yang di buat untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi pertumbuhan inklusif

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka saran yang tepat untuk direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yg efektif dan efisien khususnya di daerah dengan pertumbuhan ekonominya masih rendah untuk mendorong memanfaatkan hal yang ada di daerah masing-masing agar semua daerah dapat merasakan pertumbuhan ekonomi inklusif;
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil penelitian mengenai bidang yang sama, diharapkan mampu mengembangkan populasi yang lebih luas seluruh Indonesia yang meliputi

pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota, menambahkan variabel yang lain untuk diteliti lagi seperti tingkat Pendidikan, infrastruktur, tingkat kesehatan, tenaga kerja dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

- Alghofari, Farid, 2010, "Analisis Tingkat Pengangguran" di Indonesia, *Skripsi tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Ali, & Zhuang. (2007). Inclusive Growth Toward A Prosperous Asia: Policy Implications. *ERD Working Paper Series*, (97), 1–44.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur 2016 - 2020* (pp. 335–358).
- bps.go.id. (2010). [Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi (Persen), 2016- 2020.
- Balai Statistik Daerah (BAPPEDA DIY) dan Badan Pusat Statistik Provinsi DIY. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015. *Laporan Akhir BAPPEDA DIY*, III.
- Ekananda, Mahyus. 2014. *Ekonometrika Data Panel*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ekananda, Mahyus. 2015. *Ekonometrika Dasar untuk Penelitian di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Farid, A. (2007). Analisis Tingkat Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980- 2007 Farid Alghofari Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. *Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980-2007*, 1–31.
- Gini Rasio Kabupaten_Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2016 - 2020*. (n.d.).
- Hapsari, S. A. D., Hutagaol, M. P., & Asmara, A. (2013). Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan

- Indonesia Bagian Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85–112.
- Hapsari, W. R. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 11.
- Hartati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79–92.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Internasional NGO Forum on Indonesia Development 2018* Dokumen Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, New York. INFID
- Kakwani, Nanak dan Hyun H. Son. 2008. Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies. *The Pakistan Development Review* Vol. 42 No. 4.
- Klasen, Stephan. 2010. Measuring and Monitoring Inclusive Growth : Multiple Definitions, Open Questions, and Some Constructive Proposals. Asia
- McKinley, T. (2010, Juni). Inclusive Growth Criteria and Indicators: An Inclusive Growth Index for Diagnosis of Country Progress. ADB Sustainable Development Working Paper Series, 2. Manila, Philippines: Asian Development Bank Sustainable Development Working Paper Series No.12.
- Mudrajad Kuncoro, “*Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*”, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006) hlm 120
- Muhidin, Sambas A, dan Maman Abdurahman. 2009. Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur dalam Penelitian, Bandung: Pustaka Setia.
- Nanga, Muana. 2005. Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Nurwati (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10 (1), 1.
- Nur Rianto al Arif, “*Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*” (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm 227
- Prabandari, D. A. N. (2018). *Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo, S. (2012). *Pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia*. Jakarta: LP3ES: Prakarsa
- Rauniar, Kanbur. 2009 *Perekonomian Indonesia Era Order Lama Hingga Jokowi* (cetakan Kedua): Tulus T.H Tambunan 2015 : Penerbit Ghalia Indonesia
- Sadono Sukirno. 2008. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, 2013, hlm 329
- Seran, Sirilnius. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 59-71.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Edisi Kedua). Jakarta : Kencana.
- Todaro, Smith. (2006) *Pembangunan Ekonomi* (9th ed). Jakarta Erlangga.
- Todaro, Smith. 2009. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1* (Edisi Kesebelas). Terjemahan oleh Agus Dharma. 2011. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1280257/bps->

[pertumbuhan-ekonomi-ntt-stagnan-
lima-tahun-terakhir](#)

<https://dqlab.id/mengenal-path-analysis-salah-satu-penerapan-statistik-parametrik>

<https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html>

[RPJMD P PROVINSI NTT TAHUN 2018-2023.pdf](#)Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Sam RATulangi, Manado.

Albercht,W. Steve, Albercht, Conan C., and Albercht, Chad O. 2006. Fraud Examination Second Edition. Canada: Thomson South-Western.

The Institute of Internal Auditors. 2017. "International Standards for The Professionals Practice of Internal Auditing 2017". Retrieved from <https://na.theiia.org>, on 1st March 2019.

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN (STUDI KASUS DESA NEKBAUN, KECAMATAN AMARASI BARAT, KABUPATEN KUPANG)

Antho S.Y Kerih

Universitas Nusa Cendana
kerihianthon@gmail.com

Yohanes Demu

Universitas Nusa Cendana
yohanesdemudemu23241@gmail.com

Melianus E. Tkela

Universitas Nusa Cendana
jongfridz@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengelolaan dana desa tahun 2021 dalam bidang pemberdayaan. Hal ini tentu akan disesuaikan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi lapangan pada 14 orang informan sebagai informan kunci yang dipercaya mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ditemukan bahwa adanya program yang belum terealisasi atau pun berjalan dengan baik seperti BUMDES dan Taman Eden dikarenakan pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan belum menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipan, dan taat serta disiplin anggaran secara baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; kurang pemahaman dari aparat desa mengenai pengelolaan dana desa khususnya dalam bidang pemberdayaan, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat juga dalam pelaksanaan program, tidak adanya pengawasan dari tingkat kabupaten atau pun provinsi juga menyebabkan pemerintah desa lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, pelatihan dan sosialisasi yang kurang juga dianulir sebagai salah satu kendala dalam proses pengelolaan dana desa, disisi lain adanya oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dari dana yang bersumber dari APBN ini dan yang terakhir merupakan masalah klasik yang ditemukan hampir disetiap desa yaitu Sumber Daya Manusia yang kurang mumpuni dikarenakan masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Bidang Pemberdayaan.

ABSTRACT

This study aims to identify and explain how the village fund management in 2021 in the field of empowerment. This will certainly be adjusted based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. This research uses qualitative method with interview technique and field documentation on 14 informants as key informants who are trusted to know about village financial management starting from the planning, budgeting, implementation, administration, reporting and accountability stages. The results of the study found that the existence of programs that had not been implemented or carried out well such as BUMDES and Taman Eden due to village fund management in the field of empowerment had not applied the principles of transparency, accountability, participants, and obedience and budget discipline in a good and correct manner. This is caused by several things including; lack of understanding from village officials regarding village fund management, especially in the area of empowerment, lack of level of community participation also in program implementation, lack of supervision from the district or provincial level also causes village governments to neglect in carrying out their duties and responsibilities, lack of training and socialization as one of the obstacles in the village fund management process, on the other hand, there are individuals who want to take advantage of funds sourced from the APBN, and the latter is a classic problem found in almost every village. Human power is less qualified due to the small number of people who have tertiary education.

Keywords: Village Fund, Village Fund Management, Empowerment Sector

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan jumlah provinsi sebanyak 34 dengan 415 kabupaten dan 93 kota. Indonesia menganut sistem otonomi daerah dimana setiap daerah harus mampu mengelola keuangannya sendiri demi memenuhi kebutuhannya masing-masing. Indonesia memiliki 542 daerah otonom yang memiliki tanggung jawab bagi daerahnya masing-masing. Kebijakan tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 memberikan tanggungjawab besar bagi pemerintah desa untuk berdikari dalam membangun desanya dengan lebih baik lagi.

Pada tahun 2016, Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah mengeluarkan Permendes No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c).pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Desa Nekbaun merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Peneliti memilih Desa Nekbaun sebagai tempat penelitian karena

dianggap memiliki masalah dalam pengelolaan dana desa. Desa Nekbaun menjadi salah satu desa yang juga sudah menerima aliran Dana Desa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Bidang Pemberdayaan pada desa Nekbaun memiliki tiga program yang menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat diantaranya, pengadaan ternak sapi mengeluarkan anggaran yang cukup fantastis dari jumlah alokasi di bidang pemberdayaan yakni sebesar Rp 250.000.000,- atau 66,3 persen dan 18,7 persen kalau dihitung dari keseluruhan Pendapatan Desa. Anggaran sebesar ini digunakan untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 50 ekor dengan perhitungan 1 ternak sapi mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah dan sudah termasuk didalamnya pengadaan tali, pengadaan obat dan vaksin, dan transportasi.

Bidang pemberdayaan juga memiliki sasaran lain yaitu pada Pendirian dan Pembangunan BUMDES sebesar Rp 75.000.000,- dan Pengembangan Kebun Desa (Taman Eden) sebesar Rp. 52.150.400,- ditambah dengan SILPA Kebun Desa (Taman Eden) tahun 2020 sebesar Rp 50.000.000,-. Anggaran Pengembangan Kebun Desa (Taman Eden) inidigunakan untuk Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal seperti pengadaan alat-alat pengolah pertanian dan juga pengadaan tanaman. Sementara pada Pendirian dan Pembangunan BUMDES pada tahun 2021 berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Desa Nekbaun belum terealisasikan sehingga dananya sebesar Rp 75.000.000,- dikembalikan pada kopdit desa. Dengan demikian peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi lebih dalam mengenai

Pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang dalam hal ini peneliti lebih terfokuskan dalam bidang pemberdayaan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 2012, Yuliati, 2016:24).

Karakteristik Desa

Di Indonesia, wilayah yang disebut desa seharusnya dilihat dalam tahapan yang tidak sama. Masyarakat yang telah mulai menetap juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, antara Jawa dengan luar Jawa, antara desa dekat kota dengan desa yang jauh dari kota, antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah, demikian pula antara pantai dan pedalaman. Di Indonesia kelihatannya belum ada kajian mendalam tentang hal ini. Secara umum masyarakat yang telah mulai menetap yang disebut dengan desa, istilah sebutannya sangat beragam di berbagai suku bangsa.

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Terlebih dalam Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan

pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalihan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = $\text{Pagu Dana Desa kabupaten/kota} \times [(30\% \times \text{persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan}) + (20\% \times \text{persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan}) + (50\% \times \text{persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan})]$; dan
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- c. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 1. Ketersediaan pelayanan dasar;
 2. kondisi infrastruktur;
 3. transportasi; dan
 4. komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Teori Pengelolaan

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, berarti pula pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 2013: 31). Menurut

Stoner (dalam Kaho 2017: 228) manajemen dapat dilihat sebagai proses, yakni: proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka, pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Fattah (2004: 1) dalam proses manajemen terlihat terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*) dan pengawasan (*controlling*). Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 1 ayat (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

METODE PENELITIAN

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mempertanggungjawabkan data yang di dapat. Menjawab permasalahan yang diidentifikasi peneliti maka dari itu, pada penelitian ini peneliti memilih lokasi di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.

Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bagaimana Pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa/Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, atau pihak lain yang berkaitan dalam pengelolaan Dana Desa dan masyarakat.

Sumber data yang didapat peneliti yaitu data primer berupa data yang diperoleh peneliti berasal dari informan-informan yang diyakini mampu memberikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan di Desa Nekbaun seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, Pihak lain yang berkaitan dalam pengelolaan Dana Desa, dan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti berasal dari data APBDes Desa Nekbaun tahun 2017 dan juga Data Realisasi Anggaran terkait Dana Desa dan Bidang Pemberdayaan. Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (Handphone).

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data mencapai kejenuhan. Dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari, dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis., tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Setelah peneliti melakukan *data collection* atau pengumpulan data, aktivitas selanjutnya dalam pengumpulan data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan dengan persyaratan APB Desa ditetapkan. Sebagaimana diuraikan

sebelumnya, ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014. Adapun tahapan tersebut yakni:

Tahap Perencanaan

Pada desa Nekbaun perencanaan diawali dengan menyusun RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang dilaksanakan dalam kegiatan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). RKP (Rencana Kerja Pemerintah) ini merupakan dasar penetapan APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 29 ayat (5). Dalam Kegiatan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) juga ditetapkan tiga (3) program pada bidang pemberdayaan guna dimasukkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Kegiatan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) ini juga mengikutsertakan masyarakat didalamnya. Namun terlihat kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam kegiatan tersebut. Hal ini tentu tidak menjalankan asas partisipasi yang baik seperti yang ditulis dalam Permendagri 113/2014.

Tahap Penganggaran

Penetapan anggaran dilakukan setelah selesainya penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dalam musyawarah bersama seluruh elemen masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDes. Terjadinya ketidaksesuaian anggaran yang dipaparkan oleh para aparat desa ini memberikan pertanyaan bagi peneliti yang mencurigai adanya praktek-praktek manipulasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Nekbaun berdasarkan pernyataan beberapa informan. Pernyataan tersebut juga didukung pada Tabel 1 dan Tabel 2

Tabel 1 APBDes Desa Nekbaun Tahun 2021

Pendapatan Desa (Rp)	
Pendapatan Asli Desa	10.000.000,-
Dana Desa	804.407.000,-
Bagi Hasil Pajak	3.925.000,-
Alokasi Dana Desa	438.836.000,-
Silpa 2020	
- Kebun Desa (Taman Eden)	50.000.000,-
- Rehap Jembatan	24.662.600,-
Jumlah	1.331.830.600,-

Sumber : Data APBDes Desa Nekbaun Tahun 2021 (data diolah)

Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa sumber pendapatan desa dari Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa terbesar yaitu Rp 804.407.000,- atau 60,4 persen dari keseluruhan pendapatan desa sebesar Rp 1.331.830.600,-. Dana Desa yang bersumber dari APBN ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Nekbaun terutama pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentu belum menunjukkan adanya asas transparansi yang menjadi salah satu asas dalam pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pada table 2 menunjukkan dalam table berikut ini.

Tabel 2 Data APBdes Desa Nekbaun dalam Bidang Pemberdayaan dan Pembangunan Desa Tahun 2021

Bidang Pembangunan (Rp)	Bidang Pemberdayaan (Rp)
Pembangunan Jalan Sirtu	Pengadaan Ternak Sapi
151.189.300	250.000.000
Pembangunan Jalan Tani	Pendirian dan Pembangunan BUMDES
55.454.500,	75.000.000,
Pembangunan Jalan Rabat	Pengembangan Kebun Desa
37.671.800,	52.150.400,
Pembangunan Embung	
110.263.100	
Jumlah	Jumlah
354.578.700	377.150.400

Sumber : Data APBDes Desa Nekbaun Tahun 2021

Pada 1.2. tabel dapat dilihat dalam Bidang Pembangunan dialokasikan sebesar Rp 354.578.700,- atau 26,6 persen dari total jumlah pendapatan desa lebih kecil dari pada anggaran pada Bidang Pemberdayaan sebesar Rp 377.578.700,- atau 28,3 persen dari jumlah pendapatan Desa Nekbaun Tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa bidang pemberdayaan merupakan fokus utama desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa agar tercapainya kesejahteraan masyarakat atau perubahan yang lebih baik kedepannya.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan menunjukkan hasil dari ketiga program pada Bidang Pemberdayaan tersebut yang sudah berdampak bagi masyarakat yaitu program Ternak Sapi. Semenjak direalisasinya program ini masyarakat mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat dari sebelumnya. Hal ini tentu berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Nekbaun. Namun pada program BUMDES terlihat belum berjalan, kendalanya ditemukan pada kemampuan masyarakat desa yang masih minim dalam mengelolah anggaran yang jumlahnya tidak sedikit, kompetensi sumber daya manusia yang tidak menggambarkan pada proses kemandirian (Tri Winarni, 1998: 76). Pada program BUMDES juga dicurigai adanya praktek-praktek manipulasi anggaran oleh beberapa oknum dikarenakan anggaran sebesar Rp 75.000.000,- tersebut sudahlah dicairkan. Sedangkan pada program Taman Eden terlihat adanya monopoli yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menjalankan program dan tidak mengikutsertakan masyarakat desa. Dengan demikian permasalahan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang ini tidak sesuai dengan Asas Transparansi, Partisipatif dan Akuntabel.

Tahap Penatausahaan

Tahap Penatausahaan pernyataan Kepala Desa Nekbaun dan Sekretaris Desa Nekbaun menjelaskan fakta yang terjadi di Desa Nekbaun mengenai laporan bulanan dari bendahara ke Kepala Desa. Dimana hal ini menunjukkan bahwa tugas bendahara tidak dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan tindakan aparat desa yang melanggar Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib dan Disiplin belum berjalan sesuai dengan yang dituliskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang, Pengelolaan Keuangan Desa. Tidak adanya pelatihan bagi aparat desa untuk menunjang kapasitas dan kesadaran akan hukum juga menjadi penyebab terjadinya kelalaian aparat Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan bahwa adanya kelalaian dari Kepala Desa Nekbaun yang menjalankan tugasnya dalam pasal 37 ayat (1), Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Keterlambatan pencairan Dana Desa juga menjadi kendala yang besar dalam proses pengelolaan Dana Desa juga perealisasi program. Hal ini juga menunjukkan belum berjalannya asas akuntabilitas juga asas tertib dan disiplin yang belum dijalankan secara baik dari para aparat Desa Nekbaun. Kelemahan kompetensi para aparat menjadi penyebab terjadinya hal yang tidak sesuai pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Asas Transparansi juga menjadi kendala bagi masyarakat Desa Nekbaun. Menurut pengamatan dan beberapa hasil wawancara yang diperoleh peneliti, sekarang memang sudah disediakan informasi pada papan baliho yang dipasang di Kantor Desa dan daerah sekitaran Desa Nekbaun namun hal tersebut juga nyatanya kurang memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa dikarenakan anggaran yang keluar dan masuk tiap bulan, tiap triwulan, dan tiap semester tidak pernah di informasikan kepada masyarakat Desa Nekbaun.

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang belum memenuhi asas-asas yang tertera dalam Permendagri 113/2014 yaitu, Asas Partisipatif, Transparan, Akuntabel, Asas Tertib dan Disiplin.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang belum sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta asas-asas yang berlaku di dalamnya yaitu asas partisipatif, asas transparansi, akuntabilitas dan asas tertib dan disiplin sehingga timbulnya berbagai masalah dalam pelaksanaan program di bidang pemberdayaan diantaranya Taman Eden dan BUMDES. Lemahnya kemampuan aparat desa dalam mengelola dana desa secara baik dan benar menjadi masalah bagi proses pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan. Kurangnya partisipasi

masyarakat juga menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa di desa Nekbaun.

Pemerintah Desa harus mengadakan sosialisasi pembinaan dan pelatihan secara langsung dan menyeluruh tentang peraturan menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 kepada Aparatur Pemerintah Desa dan seluruh tokoh masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan. Pengelolaan Dana Desa harus berdasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku serta harus memenuhi asas-asas yang telah di tetapkan yaitu, Asas Transparan, Akuntabel, Partisipan Serta Dengan Tertib Dan Disiplin anggaran dengan memberikan bimbingan secara terus menerus diharapkan setiap perangkat desa lebih mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. Bagi seluruh Masyarakat Desa Nekbaun terutama yang menerima bantuan dalam bidang pemberdayaan seperti Ternak Sapi, BUMDES, dan Taman Eden diharapkan lebih aktif dan partisipatif untuk ikut andil dalam Pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2013. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dokumen APB-Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, 2020. Dokumen APB-Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, 2021. Dokumen Data Umum dan Data Kependudukan Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Februari 2021.
- Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang Tahun 2021
- Fatta, Nanang. (2014). Konsep Manajemen Besrbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Follet, Mary Parker. (2012). Visionary Leadership and Strategic Management. MCB University Press.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. (2016). DESA. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karimah, Faizatul. Saleh, Choirul. dan Wanusmawatie, Ike. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya.
- Prasetyanigtyas, Feni Yudanti. dan Sulandari, Susi. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. Jurnal Ekonomika dan Keuangan Program Sarjana Ilmu Departemen Administrasi Publik, Fisip Undip.
- Putra, Chandra Kusuma. Pratiwi, Ratih Nur .dan Suwondo. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Riskawati. Amaliah, Tri Handayani. dan Lukum, Amir. (2016). Analysis Of Local Government Performance In Managing Distribution Of Village Funds (Case Study In Kalia Village, Talatako Sub-District, Tojo Una-Una District). Journal Accounting and Business Education. Universitas Negeri Gorontalo.
- Sahdan, Sunarto edi, Muliato. (2018), ADD untuk Kesejahteraan Rakyat Desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Susetiawan. (2015). Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Bogor: IPB Press.
- Suparjan & Hempri Suyantno. (2013). Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai

- Pemberdayaan. Yogyakarta: Aditya Media.
- Sumpeno, Wahjudin. (2011).
Perencanaan Desa Terpadu.
Banda Aceh: Edisi Kedua.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2015) Perencanaan
Pembangunan Daerah Otonom dan
Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta :
Citra Utama
- Suryana. (2016). Kewirausahaan
Pedoman Praktis: Kiat dan
Proses Menuju Sukses. Jakarta: Edisi
Ketiga, Penerbit Salemba.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa.
- Winarni, Tri. (2018). Memahami
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Partisipatif dalam Orientasi
Pembangunan Masyarakat Desa
Menyongsong Abad 21: Menuju
Pemberdayaan Masyarakat . Yogyakarta:
Aditya Media.
- Yayuk Yulianti. (2013). Sosiologi Pedesaan.
Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.